

LAPORAN PENELITIAN
EVALUASI PENERAPAN PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU
DAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH DALAM
MENDUKUNG PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PADA PEMERINTAH DKI JAKARTA



Tim Peneliti:

NELLI NOVYARNI

NIDN: 0306117501

IMELDA APRILENY

NIDN: 0324047401

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
JAKARTA
2019

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN**

Judul : Evaluasi Penerapan Pendekatan Anggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Mendukung Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah DKI Jakarta

Ketua Tim Peneliti : Nelli Novyarni, SE., M.Si., Ak., CSRS., CSRA., CSP
NIDN: 0306117501

Anggota Tim Peneliti :

1. Nama : Imelda Aprileny, SE., ME NIDN: 0324047401

Lokasi Penelitian : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota DKI Jakarta

Luaran yang dihasilkan : Jurnal Internasional

Biaya Total : Rp 3.500.000,-

-STET : Rp 3.500.000,-

-Sumber lain (.....) :

Jakarta, 06 Nopember 2019

Ketua Tim Peneliti,



(Nelli Novyarni, SE., M.Si, Ak, CSRS.,
CSRA., CSP)

NIDN: 0306117501

**Menyetujui,
Kepala Penelitian**

**Mengetahui,
Wakil Ketua IV**

(Ir. Dwi Windu Suryono, M.Sc)
NIDN: 0327076101

(Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc)
NIDN: 0325036001

DAFTAR ISI

		Hal.
Halaman	i
Pengesahan		
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Abstrak	vii
BAB	I. PENDAHULUAN.....	1
	
	1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
	1.2. Rumusan Masalah.....	3
	1.3. Tujuan dan Manfaat.....	3
	1.3.1. Tujuan Penelitian.....	3
	1.3.2. Manfaat Peneltian.....	3
BAB	II. TINJAUAN PUSTAKA	5
	2.1. Landasan Teori	5
	2.1.1 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Berhubungan dengan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.....	5
	2.1.2 Tujuan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF).....	6
	2.1.3 Anggaran Terpadu.....	8
	2.1.4 Penganggaran Berbasis Kinerja.....	8
	2.1.5 5 Buku Pedoman Direktorat Jendral Anggaran (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: 2009).....	9
	2.2. Penelitian Sebelumnya.....	30
	2.3 Kerangka Penelitian.....	33
BAB	III. METODELOGI PENELITIAN	34
	3.1. Lokasi Penelitian.....	34
	3.2. Subjek, Objek dan Unit Analisis Penelitian.....	34
	3.3. Populasi, Sampel dan Sampling.....	35
	3.3.1. Populasi.....	35
	3.3.2. Sampel.....	35
	3.3.3. Sampling.....	35
	3.4. Tahapan Penelitian.....	35
	3.5. Rancangan Penelitian.....	36
	3.6. Pengumpulan Data.....	38
	3.7. Metode Analisis Data.....	39
	3.8 Jadwal Kegiatan dan Realisasi Biaya	42

BAB	IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
		4.1. Hasil Penelitian.....	44
		4.1.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	44
		4.1.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	43
		4.1.2.1. Hasil Uji Validitas.....	45
		4.1.2.2. Hasil Uji Reliabilitas.....	46
		4.2. Analisis dan Pembahasan.....	47
		4.2.1. Analisis Penerapan Anggaran Terpadu dalam Mendukung Anggaran Berbasis Kinerja	47
		4.2.2 Analisis Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam Mendukung Penganggaran Berbasis Kinerja	52
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
		5.1. Kesimpulan.....	69
		5.2. Saran.....	74
		PENUTUP	76
		DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Hal.	
Tabel 2.1	Reformasi Sistem Penganggaran	18
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	37
Tabel 3.2	Standar Reliabilitas dan Validitas	41
Tabel 3.3	Range dan Kategori	41
Tabel 3.4	Jadwal Kegiatan Penelitian Yang diajukan dalam 1 Tahun Proses	42
Tabel 3.5	Realisasi Biaya	43
Tabel 4.1	Uji Validitas	45
Tabel 4.2	Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.3	Hasil Kuisisioner Penerapan Anggaran Terpadu	47
Tabel 4.4	Hasil Kuisisioner Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah	52
Tabel 4.5	Hasil Kuisisioner Penerapan Anggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah	65
Tabel 4.6	Penganggaran Berbasis Kinerja	66

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Paradigma Lama dan Baru.....	18
Gambar 2.2	Kerangka Penelitian.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kusioner
Lampiran 2	Fotokopi Kuitansi Realisasi Biaya Penelitian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pendekatan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah DKI Jakarta.

Evaluasi penerapan pendekatan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah DKI Jakarta melalui metode pengumpulan data kuisisioner. Kuisisioner akan disebar kepada orang-orang yang terlibat dalam pelaporan keuangan pemerintah seperti bagian penganggaran Bappeda dan Subanpeko di daerah pemerintah kota dan provinsi DKI Jakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan angket berupa kuisisioner yang ditujukan kepada Auditor Internal Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 71 Responden. Pengukuran variabel bebas dengan menggunakan dimensi dari penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dari dimensi tersebut digunakan indikator-indikatornya agar dapat diukur dengan menggunakan skala likert dianalisis peneliti melalui pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penerapan pendekatan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka sudah berjalan baik ini dibuktikan dengan penerapan penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah sudah dijalankan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini.

Keyword: penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran berbasis kinerja

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Latar belakang perlunya reformasi system anggaran didasarkan hasil evaluasi system anggaran negara yang diterapkan lebih dari 30 tahun atau dua budget system yang diidentifikasi terdapat kelemahan yaitu kurangnya disiplin anggaran dimana ada dua system anggaran yang pengelolaannya terpisah. Anny Ratnawati (2009), selaku dirjen anggaran departemen keuangan, mengemukakan bahwa kurang menunjukkan adanya jaminan kesinambungan fiskal yang disebabkan oleh system anggaran yang diterapkan bersifat *single year* dan *zero based budgeting*, kurangnya transparansi, kurangnya tingkat efisiensi dan kurangnya akuntabilitas. Sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen keuangan modern sistem anggaran Negara Indonesia sudah sepatutnya dilakukan reformasi mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pabrik yang secara internasional digunakan. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran terpadu (*Unified Budget*); (2) kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) biasa disebut KPJM; dan (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (*performance based budget*).

Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut di atas focus pada PBK. Kedua pendekatan lainnya (anggaran terpadu dan KPJM) mendukung penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan syarat penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminan kontinuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga tiga atau lima tahun ke depan.

Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*), dan hasil yang diharapkan (*outcomes*),

sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. Ciri utama tersebut sampai saat ini belum tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada. Hal ini, seperti yang dikatakan Sri Mulyani (2009), selaku Menteri Keuangan dan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian, mengemukakan bahwa mengubah sistem anggaran berbasis kinerja bukan perkara yang mudah. Di Negara lain butuh sampai 10 tahun untuk menerapkannya. Sri Mulyani juga berharap perubahan system penganggaran itu tak menjadi kendala bagi perekonomian, karena pengalaman pada tahun 2005 menunjukkan perubahan system penganggaran pernah menyebabkan meorosotnya tingkat penyerapan anggaran.dan jangan sampai perubahan system kali ini akan menjadi hambatan serupa.

Faktor lain lemahnya system anggaran sebelum tahun 2005 adalah kurang terkaitnya antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam proses penganggaran APBN/APBN, penganggaran yang berhorizon satu tahun dan terpisahnya anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Penganggaran yang lemah, menurut buku pedoman Penganggaran Berbasis Kinerja (buku1) penyebabnya antara lain adalah: (1) belum digunakannya resource envelope sebagai landasan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan renstra K/L. (2) Program dan kegiatan belum dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional dan efisiensi belanja;(3) program dan kegiatan juga belum dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja suatu unit kerja; (4) pada tingkat operasional masih ada beberapa pertanyaan mendasar mengenai keterkaitan dokumen perencanaan dan anggarannya. Misalnya bagaimana melakukan penilaian terhadap : keterkaitan program dengan sasaran pembangunan nasional; keterkaitan kegiatan dengan program;keterkaitan indicator keluaran dengan keluarannya.Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, berbagai upaya terus dilakukan baik melalui kajian dengan mengacu pada pengalaman internasional, koordinasi antar instansi yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran serta penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Upaya tersebut merekomendasikan perlunya: i) restrukturisasi program/kegiatan; dan ii) adanya pedoman yang memberikan arahan penerapan konsep-konsep PBK secara

operasional dan sederhana, dengan bahasa yang mudah dipahami. Oleh karena itu, dipandang perlu menyusun pedoman penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagai acuan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja oleh kementerian dalam negeri khususnya propinsi DKI Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dikemukakan adalah: Belum adanya ciri utama PBK yaitu anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan (outcomes)

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan anggaran terpadu pada kabupaten/kota/propinsi DKI dalam mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah provinsi dan kota DKI Jakarta sudah baik?
2. Apakah penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah provinsi dan kota DKI Jakarta sudah baik?
3. Apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada kabupaten/kota/propinsi di DKI Jakarta yang didukung oleh penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah sudah baik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan anggaran terpadu pada kabupaten/kota/propinsi DKI Jakarta sudah baik.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah pada kabupaten/kota/propinsi di DKI Jakarta sudah baik.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada kabupaten/kota/propinsi di DKI Jakarta yang didukung oleh penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah sudah baik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - A. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE), hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah literature perpustakaan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIE)
 - B. Bagi masyarakat, bagi pihak- pihak yang berkepentingan dapat dijadikan referensi untuk memperluas wawasan pengetahuan dan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - A. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan minat beli konsumen melalui perwujudan variabel-variabel yang mempengaruhinya
 - B. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang Manajemen Pemasaran yang berkaitan dengan loyalitas pelanggan.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Berhubungan dengan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.

Aspek yang tersedia dalam penerapan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah yaitu:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
3. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan:
 1. Anggaran terpadu (unified budget),
 2. Kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan
 - 3, penganggaran berbasis kinerja (performance based budget).
4. Peraturan menteri keuangan tentang petunjuk penyusunan RKA-KL (rencana kerja kementerian dan anggaran- kementerian lembaga)yang ditetapkan dan diterbitkan tiap tahun.

Dan dasar hukum yang lain:

5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
6. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
7. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah

2.1.2 Tujuan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF):

Secara umum tujuan MTEF adalah:

1. Memperbaiki situasi fiskal secara makro, sehingga dapat menurunkan defisit anggaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih rasional dalam menjaga stabilitas ekonomi
2. Meningkatkan dampak kebijakan pemerintah dengan cara mengkaitkan Prioritas dan kebijakan pemerintah dengan program-program yang dilaksanakan
3. Meningkatkan kinerja dan dampak program salah satunya dengan cara mengubah kultur birokrasi dari administratif ke manajerial
4. Menciptakan fleksibilitas manajerial dan inovasi sehingga tercapai rasio cost/output yang lebih rendah, peningkatan efektivitas program / kebijakan dan meningkatkan prediktabilitas sumberdaya.

Menurut World Bank (1998) dalam syukriy abdullah (2010) tujuan KPJM adalah:

1. Mengembangkan keseimbangan dalam kebijakan ekonomi makro dan penegakan disiplin fiskal
2. Mengalokasikan sumber daya sektoral secara lebih baik
3. Prediktabilitas anggaran yang lebih baik untuk setiap urusan atau kewenangan
4. Akuntabilitas politik yang lebih baik untuk outcome pengeluaran publik dalam suatu proses pembuatan keputusan yang legitimate
5. Menghasilkan pengambilan keputusan penganggaran yang lebih kredibel.

World Bank (1998:47-51) menyebutkan enam tahapan dalam KPJM yakni:

1. Pembentukan kerangka ekonomi makro dan fiskal: tahap ini dicirikan dengan pembentukan model ekonomi makro yang dapat memproyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam jangka menengah (*medium term-year*)

2. Pengembangan program-program sektoral yang dilaksanakan dengan melakukan:
 - A. kesepakatan atas objectives, outputs dan activities setiap sektor
 - B. mereview dan mengembangkan program dan sub program
3. Pengembangan kerangka pengeluaran sektoral yakni dengan menganalisis trade-off yang terjadi antar sektor dan dalam sektor sendiri dan membangun konsensus terkait dengan pengalokasian sumber daya jangka panjang (strategik) membuat masing-masing program
4. Mendefinisikan alokasi-alokasi sumberdaya sektoral dengan cara menentukan *budgetceilings* sektor untuk jangka menengah (3-5 tahun)
5. Penyiapan anggaran sektoral: program-program sektoral yang bersifat jangka menengah
6. Pengesahan KPJM secara politik yakni melalui pemaparan estimasi anggaran ke kabinet dan parlemen untuk disahkan.

Pasal 1 angka 33 peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 dan pasal 1 angka 35 peraturan menteri dalam negeri no,13 /2006 menyatakan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam KPJM dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia

Perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun yang kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi penyusunan anggaran tahun berikutnya

Berdasarkan pasal 1 angka 34 PP No.58/2005 dan pasal 1 angka 36 Permendagri No,13/2006. Konsep yang juga tidak dapat dipisahkan adalah anggaran terpadu (*unified budgeting*) direncanakan guna memastikan yang didefinisikan sebagai penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi

Untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat ditemukan beberapa hal penting dalam KPJM, yakni:

1. Penggunaan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan
2. Pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif satu tahun anggaran
3. Implikasi biaya dan kebutuhan dana
4. Memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui. Hakikat dari penganggaran berbasis kinerja bukanlah periode pelaksanaan anggaran tetapi hasil (*outcome*) yang hendak dicapai. *outcome* merupakan solusi atas masalah/kebutuhan yang dihadapi pemerintah dan/atau masyarakat sementara periode anggaran adalah mekanisme untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
5. Terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan.

2.1.3 Anggaran Terpadu

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana kementerian /lembaga baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Anggaran terpadu ini dimaksudkan agar kegiatan berjalan bersamaan/satu arah/tujuan.

2.1.4 Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan

hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut

2. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar Buku Pedoman yang diterbitkan departemen keuangan RI dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan
3. Tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan prakiraan maju pada program yang bersangkutan.

2.1.5 5 Buku Pedoman Direktorat Jendral Anggaran (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:2009)

Buku 1: Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Buku 2: Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Buku 3: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Buku 4: Format Baru Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

Buku 5: Jawal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup

2.1.5.1. Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan

2.1.5.1.1. Prinsip restrukturisasi program dan kegiatan

Pendekatan restrukturisasi program dan kegiatan mengacu pada 2 prinsip dasar yaitu:

1. Prinsip akuntabilitas kinerja kabinet (perencanaan kebijakan /policy planning)

Terdapat keterkaitan yang jelas antara program dan kegiatan dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai dengan platform (agenda) kabinet/pemerintah.

Penyusunannya akan dilakukan melalui proses teknokratis (dipersiapkan oleh jajaran birokrasi pemerintahan) yang kemudian disesuaikan dengan proses politis (menerjemahkan visi dan misi (platform) presiden terpilih)

2. Prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran).

Terdapat keterkaitan yang jelas antara tupoksi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur anggaran).

Terdapat keterkaitan yang jelas antara tupoksi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan kegiatan (struktur anggaran)

Kedua prinsip ini ditujukan untuk meningkatkan keterkaitan antara pendanaan dengan akuntabilitas kinerja baik di tingkat cabinet/pemerintah (prinsip akuntabilitas kinerja cabinet) maupun di tingkat K/L (prinsip akuntabilitas kinerja organisasi).

2.1.5.1.2 Arsitektur Program

2.1.5.1.2.1 Struktur arsitektur program

- a. struktur organisasi K/L
- b. struktur anggaran
- c. struktur perencanaan kebijakan (Policy Planning) dan
- d. struktur manajemen kinerja

2.1.5.1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi pemerintahan terdiri dari 4 karakteristik K/L yaitu: (1) lembaga tinggi Negara dan kementerian; (ii) departemen; (iii) kementerian Negara dan kementerian coordinator; dan (iv) lembaga pemerintahan non departemen (LPND) dan lembaga non –struktural.

Secara structural masing-masing organisasi tersebut terdiri dari pejabat eselon 1,2,3 dan 4. Berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan secara umum unit eselon 1 A akan bertanggung jawab pada pelaksanaan program dan unit eselon 2 akan bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, struktur anggaran belanja Negara dirinci menurut: (1) fungsi (sub-fungsi); (ii) organisasi, (iii) program; (iv) kegiatan ; dan (v) jenis adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang diwujudkan melalui penjabaran prestasi kerja dari setiap K/L. Laporan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja K/L.

Implikasi dan pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2003 dalam restrukturisasi program dan kegiatan adalah perlunya dsyaratkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja.

Dalam restrukturisasi program dan kegiatan seluruh program dan kegiatan dilengkapi dengan indicator kinerja beserta anggarannya, untuk digunakan sebagai alat ukur pencapaian tujuan pembangunan yang efektif dan efisien secara teknis operasional serta dalam pengalokasian sumber dayanya.

2.1.5.1.2.3 Struktur Perencanaan Kebijakan (Policy Planning)

Struktur perencanaan kebijakan (policy planning) terdiri dari: (1) Prioritas; (2) focus prioritas dan (3) kegiatan prioritas.

Prioritas merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi (platform) presiden terpilih.

Fokus prioritas merupakan bagian dari prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/L.

Kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk mendapatkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) dari focus prioritas.

Pendekatan perencanaan kebijakan merupakan alat dalam menerjemahkan visi dan misi (platform) presiden terpilih. Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, perencanaan kebijakan (tingkat kabinet) akan diterjemahkan

dalam bentuk prioritas, focus prioritas dan kegiatan prioritas yang kemudian dilaksanakan oleh masing-masing K/L.

Jika dikaitkan dengan struktur manajemen kinerja, maka prioritas akan terkait dengan pencapaian sasaran pokok (impact) focus prioritas terkait dengan pencapaian outcome dan kegiatan prioritas terkait dengan pencapaian output.

Pada tingkat K/L, prioritas dan focus prioritas diterjemahkan melalui program dan kegiatan. Program dalam struktur policy planning berfungsi untuk memberikan rumah bagi kegiatan prioritas pada tingkat K/L dalam acuan setiap kegiatan prioritas pada tingkat K/L dalam artian setiap kegiatan prioritas selain akan mendukung pencapaian prioritas dan focus prioritas tertentu juga sekaligus akan mendukung pencapaian sasaran program dalam K/L.

Pencapaian fokus prioritas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan prioritas, dengan masing-masing kegiatan prioritas tersebut dapat berada dalam beberapa program-program yang berbeda di tingkat K/L. Dengan demikian, keberadaan focus prioritas sekaligus berperan sebagai instrument koordinasi antara K/L.

2.1.5.1.2.4 Struktur Manajemen Kinerja

Kinerja dalam arsitektur program merupakan struktur yang menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan serta merupakan instrument untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran kerangka penyusunan kinerja dimulai dari “apa yang ingin diubah” impact yang kemudian membutuhkan rumusan “apa yang akan dicapai” (outcome) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, pendekatan manajemen kinerja yang akan diterapkan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu: (1) kinerja pada tingkat K/L terkait dengan struktur informasi kinerja, tingkat kinerja yang akan disusun terdiri dari impact, outcome dan output.

Berdasarkan hal tersebut di atas, struktur manajemen kinerja akan terdiri atas:

a. Akuntabilitas pada tingkat perencanaan kebijakan (tingkat cabinet/pemerintah), memuat informasi kinerja yaitu: Impact (sasaran pokok); (ii) outcome (kinerja focus prioritas) dan (iii) output (kinerja kegiatan prioritas).

Sasaran pokok (impact) merupakan kinerja dari prioritas, outcome focus prioritas merupakan kinerja dari focus prioritas dan output kegiatan prioritas merupakan kinerja dari kegiatan prioritas.

b. Akuntabilitas pada tingkat kementerian Negara/lembaga (K/L) memuat informasi kinerja yaitu (i) impact (misi/sasaran K/L); (ii) outcome (kinerja program); dan (iii) output (kinerja kegiatan).

Misi/sasaran K/L (impact) merupakan kinerja yang ingin dicapai K/L outcome program merupakan kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 1A, dan output kegiatan merupakan kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon 2.

Pencapaian misi/sasaran K/L (impact) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (outcome) yang ada di dalam K/L dan pencapaian kinerja program (outcome) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (output).

2.1.5.1.3 Indikator Kinerja

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (impact, outcome dan output) baik di tingkat cabinet/pemerintah ataupun di tingkat K/L, pengukuran kinerja memerlukan penetapan indicator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (impact, outcome dan output).

2.1.5.1.3.1 Kriteria Penyusunan indicator kinerja

Penyusunan indicator kinerja, perlu untuk mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1. *Relevant*: indicator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.

2. *Well-defined*: definisi indicator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimenegerti dan digunakan;
3. *Measurable*: indicator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
 - indicator kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit
Contoh: indicator kuantitas : jumlah penumpang internasional yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut
 - indikator kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan).
Contoh indicator kualitas: proporsi kedatangan penumpang internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30 menit
 - indikator harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
Contoh indicator harga: biaya pemrosesan imigrasi penumpang.
4. *Appropriate*: indicator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
5. *Reliable*: indicator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
6. *Verifiable*: memungkinkan proses validasi dalam system yang digunakan untuk menghasilkan indicator
7. *Cost-effective*: kegunaan indicator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Selanjutnya, definisi masing-masing indicator kinerja berdasarkan struktur manajemen kinerja pada arsitektur program dijabarkan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja pada tingkat cabinet/pemerintah (perencanaan kebijakan)

- Indikator impact/indicator kinerja prioritas

Impact pada tingkat perencanaan kebijakan merupakan kinerja dari prioritas. Perencanaan kebijakan merupakan kinerja dari prioritas. Pencapaian kinerjanya diukur menggunakan indicator impact indikator kinerja prioritas.

Contoh: prioritas peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya taraf kesejahteraan penduduk dengan indicator kinerja prioritas antara lain prosentase angka kemiskinan nasional.

●Indikator outcome/indicator kinerja focus prioritas

Outcome pada tingkat perencanaan kebijakan merupakan kinerja dari focus prioritas pencapaian kinerjanya diukur kinerja dari focus prioritas. Pencapaian kinerjanya diukur menggunakan indicator outcome/indicator kinerja focus prioritas.

Contoh:

- fokus prioritas perlindungan social, kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas perlindungan social dengan indicator kinerja focus prioritas antara lain prosentase penduduk miskin mendapatkan pelayanan dasar.

- Fokus prioritas pemberdayaan masyarakat kinerja yang diharapkan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat miskin dengan indicator kinerja fokusprioritas antara lain prosentase penduduk miskin yang mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dan

- Fokus prioritas pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil, kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas dan kemampuan daya saing usaha kecil dengan indicator kinerja focus prioritas antara lain prosentase usaha kecil memiliki akses pemasaran produk.

●. **Indikator Output/indicator kinerja kegiatan prioritas**

Output pada tingkat perencanaan kebijakan merupakan kinerja dari kegiatan prioritas. Pencapaian kinerjanya diukur menggunakan indicator output/indicator kinerja kegiatan prioritas. Contoh: Fokus prioritas perlindungan social diwujudkan melalui:

- kegiatan prioritas Jamkesmas, kinerja yang diharapkan dari kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya cakupan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan indicator kinerja kegiatan prioritas antara lain prosentase penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan
- kegiatan prioritas, kinerja yang diharapkan dari prioritas ini mencakup layanan bahan pangan yang layak bagi penduduk miskin dengan indicator kinerja kegiatan prioritas antara lain prosentase penduduk miskin memperoleh akses bahan pokok.
- dan sebagainya

2.1.5.2. Penganggaran berbasis kinerja (PBK)

Penganggaran berbasis kinerja adalah proses penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja yang terdiri dari program (Kementerian keuangan dan Bappenas, 2009). Perencanaan kerja yang dimaksud adalah memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam PBK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entity*).

Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja:

Dengan penyusunan PBK diharapkan rencana dan program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada:

- a. terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan
- b. dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- c. Tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian sosial.
- d. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1.5.2.1. Hal-hal yang perlu diukur dalam penganggaran berbasis kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan terhadap pencapaian hasil/realisasi penggunaan dana dari beberapa aspek bidang penganggaran dalam kurun waktu tertentu yaitu:

1. Masukan, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dalam hal ini masukan yang perlu diukur adalah realisasi penggunaan sumber daya berupa alokasi dana, seberapa besar dana yang telah digunakan.
2. Proses adalah ukuran kegiatan dari segi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan persentase pencapaian hasil kegiatan.
3. Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Keluaran ini diukur berdasarkan satuan yang telah ditentukan.
4. Hasil, merupakan bagian segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung yang merupakan bagian dari persentase pencapaian sasaran program dan keterkaitannya.

Substansi yang dievaluasi:

Evaluasi kinerja kegiatan pada satu unit kerja merupakan analisis yang dilaksanakan oleh K/L terhadap pencapaian output dan outcome pada program/kegiatan atas alokasi input dengan membandingkan realisasi terhadap rencana (meliputi) masukan, keluaran dan hasil). Secara rinci hal-hal yang dievaluasi adalah:

1. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan

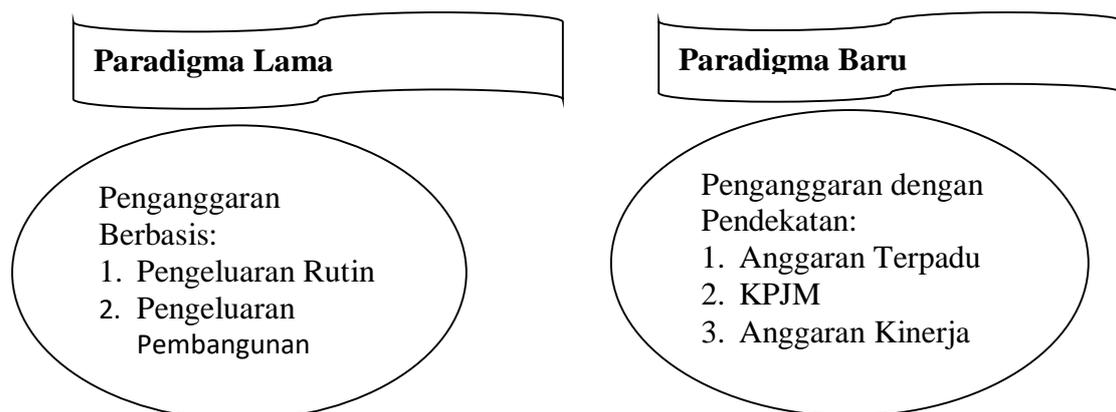
2. Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiatan
3. Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome) program
4. Perbandingan antara yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan.

2.1.5.2.2 Reformasi sistem penganggaran yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta

Reformasi sistem penganggaran adalah tertera dalam table berikut ini:

Tabel 2.1
Reformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama	Paradigma Baru
Visi:	Visi:
Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN	Melaksanakan program kerja presiden terpilih
Misi:	Misi:
Penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan	Pelaksanaan keangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan	Anggaran disusun berdasarkan RKP dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara



Gambar 2.1 Paradigma Lama dan Baru

Dasar Hukum Penganggaran Berbasis Kinerja:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
5. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga (RKA-KL).
6. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah.

2.1.5.3 Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

2.1.5.3.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penerapan KPJM dalam sistem penganggaran di Indonesia adalah UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No.21 tahun 2004 tentang petunjuk penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga (RKA-KL). Di samping itu sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan rencana kerja anggaran kementerian Negara/lembaga maka KPJM juga diatur dalam peraturan menteri keuangan tentang petunjuk penyusunan RKA-KL yang ditetapkan dan diterbitkan tiap tahun.

2.1.5.3.2 Kerangka konseptual KPJM

Untuk menerapkan KPJM dengan baik maka perlu memahami kerangka konseptual KPJM yang meliputi:

1. Penerapan system anggaran bergulir (rolling budget)
2. Adanya angka dasar (baseline)
3. Penetapan parameter
4. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar dan
5. Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives).

2.1.5.3.3 Prinsip Kerja KPJM

Kerangka Kerja KPJM yang efektif pada dasarnya terdiri atas 3 komponen penting meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendekatan top-down dalam menentukan besaran sumber daya anggaran (resource envelope) yang berperan sebagai batas pendanaan tertinggi (hard budget constraint) bagi setiap institusi/sector pemerintahan
2. Pendekatan bottom-up dalam melakukan estimasi kebutuhan di tahun anggaran saat ini maupun dalam jangka menengah, untuk membiayai kebijakan yang tengah dilakukan saat ini dan akan terus dilaksanakan beberapa tahun ke depan sesuai dengan amanat perencanaan yang telah diputuskan
3. Kerangka kerja anggaran yang menghasilkan kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya anggaran dalam jangka menengah.

2.1.5.3.4 Tahapan Penerapan KPJM

Untuk menerapkan KPJM sesuai dengan kerangka konseptual dan kerangka kerja KPJM, maka diperlukan tahapan implementasi KPJM secara operasional. Secara umum implementasi system penganggaran dalam KPJM secara operasional memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis dan bersifat runtut (sequential) meliputi:

1. Evaluasi kebijakan berjalan

Evaluasi kebijakan merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi KPJM. Hal ini terkait erat dengan penerapan paradigm rolling budget. Rolling budget dapat diimplementasikan dengan baik jika dalam proses perencanaan terdapat mekanisme untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah pada tahun anggaran selanjutnya masih tetap dilaksanakan atau dihentikan.

2. Penyusunan prioritas

Pada dasarnya dalam tahap ini, pemerintah harus melakukan penyusunan prioritas kembali berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya. Penyusunan prioritas kembali ini perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran berikutnya. Di samping itu pada tahapan ini pemerintah akan mengetahui seluruh kebijakan-kebijakan public yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya, baik berupa kebijakan-kebijakan terusan/lanjutan maupun kebijakan-kebijakan baru (new initiatives) sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya.

3. Proses penganggaran

Dalam tahapan ketiga ini akan dilakukan proses penghitungan alokasi pendanaan masing-masing kebijakan berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang sesuai dengan sumber daya anggaran yang tersedia. Proses penganggaran akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Jika merupakan kebijakan lanjutan maka identifikasi pendanaannya menggunakan asumsi pendanaan tahun sebelumnya ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap parameter-parameter yang ada.
- b. Jika merupakan kebijakan baru maka identifikasi pendanaannya menggunakan metodologi penilaian kebutuhan (need assessment) dan penilaian ekonomi (economic appraisal).

4. Penetapan baseline anggaran

Yang dimaksud dengan baseline dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pada saat tahun anggaran dan ini dan tahun-tahun berikutnya dalam jangka menengah. Untuk itu pemerintah akan menetapkan baseline berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan pendanaan atas usulan kegiatan baru.

- ### 5. Penetapan parameter / indikator yang akan mempengaruhi besaran alokasi.
- Parameter adalah variable ekonomi atau spesifik (terkait) program dimana pengelola/pelaksana operasional kebijakan dan pemerintan tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari keluaran. Dalam rangka menetapkan angka-angka untuk prakiraan maju (forward estimate) digunakan 2 jenis parameter, yaitu parameter ekonomi dan parameter nonekonomi. Kesepakatan dibutuhkan untuk menghasilkan dan

mengaplikasikan perkiraan parameter untuk prakiraan maju. Pada dasarnya penetapan parameter ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan resources envelope yang merupakan estimasi top down mengenai ketersediaan sumber daya untuk pengeluaran public yang konsisten dengan stabilitas makro fiskal.

6. Penetapan tiga tahun perkiraan maju

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran di Indonesia implementasi mekanisme Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah idealnya adalah dalam jangka 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan seorang presiden terpilih. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya, KPJM di Indonesia adalah perwujudan visi Presiden terpilih yang disampaikan pada masa kampanye sehingga dalam hal ini KPJM akan berperan sebagai salah satu instrument akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi dan lingkungan makroekonomi nasional yang begitu dinamis akan relative sulit untuk menyajikan indikasi ketersediaan sumber daya anggaran (resource envelope) yang relative akurat sebagai indikasi pendanaan jangka menengah.

2.1.5.4 Format Baru Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

2.1.5.4.1 Tujuan format baru RKA-KL

Dalam penyusunan RKAKL, telah diwujudkan dalam suatu desain berupa rancang bangun format RKAKL sebagai alat bantu untuk memfasilitasi penerapan PBK dan KPJM yang memberikan informasi terkait dengan Perencanaan dan penganggaran. Dokumen RKAKL merupakan dokumen pemerintah yang berisi rencana kerja dan anggaran tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaga, yang digunakan dalam pembahasan dengan DPR. Pembahasan antara pemerintah dengan DPR tersebut harusnya fokus kepada upaya program dan kegiatan beserta alokasi anggarannya yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Sejalan hal tersebut, maka format RKA-KL akan memfasilitasinya dengan menyajikan informasi yang bersifat strategis sehingga kualitas pembahasan meningkat. RKA-KL pada dasarnya

terbagi menjadi 2(dua) kelompok informasi yaitu rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja memberikan informasi berupa: visi; misi; tujuan; kebijakan; program; hasil yang diharapkan; serta keluaran yang diharapkan. Sedangkan anggaran memberikan informasi berupa biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang Negara /Lembaga yang bersangkutan.

Berkenaan dengan penerapan Penganggaran Terpadu; Penganggaran Berbasis Kinerja; Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah diperlukan rancang bangun Format Baru RKAKL yang lebih mengedepankan informasi kinerja Organisasi Pemerintah dan keterkaitan antara biaya,

2.1.5.4.2 Ruang Lingkup

RKAKL dengan cara pandang baru berupa : fokus pada hasil dan dampak pelaksanaan suatu program/ kegiatan, bukan pada proses pelaksanaannya. Pengembangan formulir atau format RKAKL dalam rangka penerapan Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), masih mengacu kepada UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RKAKL format baru terdiri dari 2 tingkatan/ level: departemen dan Eselon I yang memuat 3 informasi yaitu: kinerja; belanja dan pendapatan. Kedua tingkatan tersebut menggambarkan pertemuan pendekatan top-down (Policy/kebijakan yang diambil tingkat pimpinan) dan pendekatan bottom-up (tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satker sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan beserta alokasi anggarannya.

2.1.5.4.3 Format Baru RKA-KL

Format baru RKA-KL mempunyai tingkatan/level pada kementerian Negara/lembaga dan Eselon 1 yang mengedepankan informasi kinerja, di samping informasi mengenai belanja dan pendapatan, sehingga strukturnya jauh berbeda dengan format RKA-KL yang lama. Format baru RKA-KL tersebut dibagi dalam 3 formulir yaitu:

1. Formulir 1 : Rencana pencapaian sasaran strategis pada kementerian Negara/lembaga
2. Formulir 2 : Rencana pencapaian hasil (outcome) unit organisasi

3. Formulir 3 : Rincian biaya pencapaian hasil (outcome) unit organisasi

Formulir-formulir dalam format baru RKA-KL berisi informasi yang berjenjang dan mempunyai keterkaitan yang jelas mengenai kebijakan yang dilaksanakan pada tingkat kementerian Negara /lembaga dengan unit organisasinya sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

2.1.5.4.4 Worksheet/Kertas Kerja

Worksheet disebut juga Kertas Kerja RKAKL adalah sarana untuk penginputan data pada semua formulir RKAKL. Worksheet juga sebagai alat bantu dalam penyusunan RKAKL yang dipergunakan dalam menghitung detail rincian biaya suatu kegiatan serta penjelasan operasionalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan informasi item-item biaya yang akan menjadi dasar dalam perincian perhitungan belanja.

Informasi yang disajikan dalam worksheet merupakan kebijakan pendekatan bottom up, yang mengakomodir kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh Satker dalam rangka pelaksanaan Kegiatan/ bagian Kegiatan yang menjadi tupoksi/ tanggungjawabnya.

Rincian kebutuhan sumber daya tiap Satker dalam Worksheet, merupakan perincian semua kebutuhan operasionalisasi baik bersifat langsung (direct costs) maupun penunjang (overhead costs) yang digunakan pada tahun anggaran yang direncanakan (bersifat tahunan).Worksheet merupakan fasilitas yang terdapat dalam aplikasi RKAKL. Petunjuk pengisian RKAKL melalui worksheet akan dijabarkan tersendiri dalam petunjuk penggunaan RKA KL.

2.1.5.5 Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup

Pilot project pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK)pada 6 Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2010, merupakan sebuah terobosan untuk penerapan PBK secara menyeluruh pada semua K/L pada tahun 2011. Langkah ini ditempuh untuk mempersiapkan secara sungguh pendekatan penganggaran sebagaimana amanat UU No.17 tahun 2003 dapat diwujudkan dengan benar. Untuk memberikan

gambaran terhadap seluruh tahapan- tahapan dan langkah yang akan dilaksanakan dalam penerapan penganggaran Berbasis Kinerja maka penyusunan jadwal pelaksanaan yang sangat dibutuhkan. Melalui penyusunan jadwal diharapkan para pihak yang terkait dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja akan dapat memahami hal-hal yang harus dipersiapkan.

Untuk itu telah disusun jadwal pelaksanaan penerapannya untuk rentang waktu yang direncanakan sampai dengan tahun 2013.

Secara garis besar jadwal penerapan PBK dan KPJM digambarkan dalam tabel 4.1. Rencananya semua tahapan akan dilaksanakan bersama-sama oleh Bappenas dan Departemen Keuangan.

Secara rinci pelaksanaan untuk setiap tahapan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Buku Manual Penyusunan buku manual merupakan langkah awal yang sangat diperlukan bagi semua pihak yang terkait, terutama para perencana dan pengambil keputusan pada tingkat K/L. Dengan adanya buku manual tersebut diharapkan mempermudah penerapan pendekatan penganggaran sebagaimana amanat UU No. 17 tahun 2003. Mengingat setiap kegiatan yang direncanakan dengan baik dan ada petunjuk operasionalnya memungkinkan para kegiatan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK). Bagi user tentu perlu ada panduan dan petunjuk operasional baik dari sisi konseptual maupun operasional penerapan PBK tersebut.

Buku manual yang akan disusun oleh Bappenas dan Departemen Keuangan mencakup : Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); Format Baru RKA-KL; serta Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup. Kelima buku tersebut merupakan satu kesatuan sebagai panduan dalam penerapan PBK dan KPJM. Diharapkan buku pedoman ini telah selesai pada triwulan II tahun 2009.

2. Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ketua Bappenas dan Menteri Keuangan diterbitkan dalam rangka penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra KL 2010-2014 dimana Kementerian Negara/Lembaga diharapkan sudah mengimplementasikan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis

kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai amanat dalam UU no.17 tentang keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SEB ini diterbitkan sebagai dasar hukum agar setiap kementerian Negara/lembaga melakukan restrukturisasi program dan kegiatan dimaksud dalam proses penyusunan RPJM 2010-2014 dan Renstra K/L 2010-2014 serta RKP RenjaK/L, RKA K/L dan DIPA. SEB ini akan diterbitkan pada bulan Juni 2009.

3. Workshop dan Training

Workshop dan training persiapan penerapan merupakan momen resmi departemen keuangan Bappenas untuk memberitahukan kepada seluruh K/L bahwa penerapan pendekatan PBK dan KPJM dilaksanakan pada tahun 2010 untuk 6 K/L piloting dan pada tahun 2011 untuk semua K/L. Sedangkan penerapan format baru RKA-KL akan diterapkan untuk seluruh K/L pada tahun 2011.

Kegiatan workshop dan training rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2009, berupa TOT untuk tim teknis, workshop internal (Direktorat sektoral Bappenas dan Direktorat di lingkungan DJA), serta workshop dan sosialisasi bagi seluruh K/L. Pelaksanaan workshop dan training kembali akan dilaksanakan pada triwulan III 2010 untuk seluruh K/L guna memberikan pengetahuan tentang tata cara pengisian ke dalam format baru RKA-KL. Sedangkan pada triwulan II tahun 2011 rencananya kembali akan dilaksanakan guna memberikan pengetahuan dan ketrampilan lebih kepada para perencana di seluruh K/L sekaligus sosialisasi jika terdapat penyempurnaan-penyempurnaan.

4. Penyusunan RPJM 2010-2014

Salah satu tugas dan fungsi Bappenas adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN pada dasarnya merupakan penjabaran dari penjabaran visi, misi dan program presiden terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.

Salah satu tugas dan fungsi Bappenas adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat induktif.

Dalam RPJMN 2010-2014 ini diharapkan telah menggunakan rumusan program dan Kegiatan hasil restrukturisasi yang telah dilakukan. Sedangkan pelaksanaan penyusunan RPJMN 2

5. Penyusunan Renstra K/L 2010-2014

Berdasarkan RPJMN yang ada, Kementerian Negara/Lembaga menyusun masing-masing Rencana Strategis (Renstra) K/L 2010-2014. Renstra yang disusun dan disyahkan oleh K/L tersebut harus mendukung dan sesuai dengan RPJMN 2010-2014. Dalam Renstra 2010-2014 ini diharapkan juga telah menggunakan rumusan program dan Kegiatan hasil restrukturisasi yang telah dilakukan. Bagi 6 K/L piloting, rumusan Program dan Kegiatan yang baru harus dipergunakan juga dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja K/L, RKAKL dan DIPA pada tahun 2010. Sedangkan untuk K/L, RKA-KL dan DIPA pada tahun 2010. Sedangkan untuk K/L selain piloting harus diterapkan pada tahun 2011.

Penyusunan Renstra 2010-2014 ini akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun 2009

6. Uji Coba Format/Sistem Baru RKA-KL

Sebelum sistem baru RKA-KL dilaksanakan, akan dilakukan uji coba penerapannya di format RKA-KL lama pada 6 K/L piloting.

Pelaksanaan uji coba ini untuk memperoleh masukan-masukan terutama kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan pelaksanaan uji coba ini diharapkan dalam penerapannya nanti berjalan dengan lancar. Pelaksanaan uji coba rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2009.

Sedangkan uji coba penerapan format baru RKA-KL untuk semua K/L rencananya akan dilakukan pada triwulan I tahun 2010. Uji coba ini juga untuk memperoleh masukan dan kendala yang bakal dihadapi dalam penerepan nati.

Kegiatan ini diharapkan selesai pada triwulan III tahun 2009.

7. Restrukturisasi Program dan Kegiatan untuk Seluruh K/L Setelah ada pembelajaran terhadap penerapan PBK dan KPJM pada 6 K/L sebagai pilot project maka restrukturisasi program dan kegiatan akan diterapkan untuk seluruh K/L (diluar 6 K/L pilot project). Harapannya dengan pengalaman dan pembelajaran penerapan PBK dan KPJM pada 6 K/L yang mempunyai struktur organisasi yang kompleks dan alokasi anggaran yang cukup besar maka restrukturisasi program dan kegiatan untuk seluruh K/L menjadi lebih mudah diterapkan karena diperkaya dengan kasus-kasus yang telah ada sebelumnya. Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun 2009.
8. Evaluasi Pelaksanaan estruktisasi Progm dan Kegiatan Setelah diterapkan dalam dokumen penganggaran dan perencanaan, rumusan-rumusan yang ada akan dievaluasi pada triwulan I dan II tahun 2010. Evaluasi terhadap pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan dilakukan dengan maksud untuk menjamin bahwa rumusan yang telah ditetapkan benarbenar menggambarkan tugas dan fungsi unit organisasi tersebut. Apabila masih ada yang perlu diperbaiki dapat dilakukan sesegera mungkin.
9. Penyempurnaan Sistem Costing
Sistem alokasi anggaran yang masih berlaku selama ini adalah sistem incremental atau penentuan anggaran dengan cara menaikkan/menurunkan alokasi anggaran yang direncanakan dengan dasar alokasi anggaran tahun sebelumnya. Dengan diterapkannya penganggaran berbasis kinerja dan

pengeluaran jangka menengah, maka alokasi anggaran berdasarkan kinerja yang hendak dicapai (telah dijelaskan di buku II) dan dengan melihat baseline yang ada (di buku III). Dengan pengalokasian anggaran yang baru ini diharapkan dapat lebih menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi. Adapun pelaksanaan penyempurnaan sistem costing ini rencananya akan dilakukan pada triwulan II dan III 2010.

10. Penyusunan system pengukuran kinerja

Sistem perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan selama ini dinilai kurang mendukung pada saat proses pertanggungjawabannya. Hal ini disebabkan suatu program dan kegiatan dipakai oleh banyak eselon I dan eselon II, sehingga sulit untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Selain itu belum adanya indikator kinerja baik IKUP maupun IKK mengakibatkan pengukuran kinerja suatu unit organisasi sulit untuk diukur. Dalam penyusunan sistem pengukuran kinerja yang baru tersebut, program dan kegiatan yang spesifik untuk unit organisasi, beserta outcome program, output kegiatan, IKUP dan IKK yang telah ditentukan dapat dijadikan alat dalam pengukurannya. Diharapkan sistem pengukuran kinerja yang disusun nantinya dapat benar-benar menilai pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dengan lebih mudah dan akuntabel. Pelaksanaan sistem pengukuran kinerja yang baru akan dilakukan pada triwulan II dan III tahun 2009.

11. Penyempurnaan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin pelaksanaan suatu pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring suatu pekerjaan dilaksanakan pada saat proses/pelaksanaan suatu pekerjaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat suatu pekerjaan telah berakhir. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan suatu pekerjaan.

Sistem monitoring dan evaluasi yang berlaku nantinya diharapkan dapat benar-benar mengetahui pelaksanaan suatu pekerjaan tahap demi tahap, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya dapat diketahui dan

diperbaiki secepat mungkin. Pelaksanaan penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi ini rencananya akan dilakukan pada triwulan I dan II tahun 2011.

12. Pengembangan Basis data yang terintegrasi

Agar sistem perencanaan dan penganggaran yang baru dapat berjalan dengan baik tentunya harus didukung dengan suatu sistem basis data yang terintegrasi. Dalam hal ini Bappenas dan Departemen Keuangan harus bisa membangun basis data yang terintegrasi, sehingga nantinya kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan dapat sejalan karena berdasarkan dari data yang sama. Sebagai bahan dalam proses pengembangannya dapat menggunakan basis data yang ada sekarang baik di Bappenas maupun di Departemen Keuangan. Pelaksanaan pengembangan basis data yang terintegrasi ini rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2009 sampai triwulan I tahun 2010, triwulan IV tahun 2010 sampai triwulan I tahun 2011 dan triwulan IV tahun 2011.

13. Penyempurnaan PP No. 22004

Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA-KL yang berlaku sekarang ini dinilai terdapat beberapa kelemahan. Untuk itu Departemen Keuangan c.q. DJA mulai triwulan I tahun 2009 melakukan upaya untuk menyusun revisi terhadap PP tersebut. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang baru. Sehingga nantinya sistem perencanaan dan penganggaran yang baru dapat berjalan dengan baik karena mempunyai payung hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Penyempurnaan ini diharapkan sudah selesai pada triwulan III tahun 2009.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Berikut penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Dalam penelitian Zuliansyah (2012) menyatakan bahwa :

- a. Perencanaan anggaran di kantor satuan polisi pamong praja Pematang Siantar masih belum menerapkan anggaran berbasis kinerja
 - b. Perencanaan anggaran masih belum disusun sesuai dengan pendekatan kinerja yang akan dicapai
 - c. Anggaran disusun masih belum berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan dalam rencana strategis maupun rencana kerja
 - d. Hingga tahun 2010 kantor satuan polisi pamong praja belum menyusun indicator kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan.
 - e. Masih belum menerapkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja.
2. Nantar et.al (2010) meneliti sebuah model integrasi dari *performance based budgeting* di perguruan Tinggi Thailand.
 3. Abimanyu, Anggito (2010) mengemukakan bahwa format anggaran terpadu menghilangkan tumpang tindih.
 4. Untuk mengoptimalkan efisiensi operasional pada satuan kerja pemerintah pusat dapat melalui peningkatan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan pengeluaran jangka menengah (Balai Diklat Keuangan Cimahi, 2012)
 5. Agus, Puji dan Riyanto, (2012), mengemukakan bahwa terdapat pengaruh implementasi penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah terhadap kinerja
 6. Penelitian lain juga dalam website www.digilib.ui.ac, mengemukakan bahwa:
 - a. Faktor komunikasi mempunyai nilai kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan KPJM
 - b. Faktor sumber daya bernilai kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan KPJM kecuali indikator tersedianya fasilitas yaitu tersedianya Ruangan yang layak dan kelengkapan komputer yang mampu mengakses internet dengan cepat namun tidak didukung indikator yang lain.

- c. Faktor kecenderungan sikap aparat pelaksana pada umumnya bernilai cukup namun tidak didukung oleh perubahan paradigma sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan KPJM.

7. Abdullah, Syukriy (2010) diambil dari *website* syukriy.wordpress.com :” mengemukakan bahwa: saat ini khususnya di negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam manajemen pembangunan Nasional (Bappenas) Keuangan publiknya. KPJM mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam beberapa tahun anggaran, dan menghubungkan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) secara komprehensif.

Dilihat dari penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang melihat apakah anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah sudah diterapkan dengan baik guna mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja.

8. Charonkul, Nantarat dan Saribanpitak, Pruet (2010) mengemukakan bahwa Sebuah Model Integrasi dari Performance-Based Budgeting yang dilakukan di Perguruan Tinggi di Thailand memperlihatkan adanya signifikansi integrasi desentralisasi dengan pendekatan sentralisasi-otoritas di dalam manajemen performance-based budget termasuk beberapa karakteristik dari model integrasi dan *budgeting* yang difokuskan ke *governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, desentralisasi-otoritas dan manajemen partisipatif.
9. Balai Diklat Keuangan Cimahi (2012), menyatakan bahwa Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah mempengaruhi bisnis operasional pada satuan kerja?hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi operasional pada satuan kerja pemerintah pusat dapat melalui peningkatan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan pengeluaran jangka menengah
10. Penelitian lain juga dalam website www.digilib.ui.ac.id, mengemukakan sebagai berikut:

- a. Faktor komunikasi mempunyai nilai kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan KPJM
- b. Faktor sumber daya bernilai kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan KPJM kecuali indikator tersedianya fasilitas yaitu tersedianya ruangan yang layak dan kelengkapan komputer yang mampu mengakses internet dengan cepat namun tidak didukung indikator yang lain.
- c. faktor kecenderungan sikap aparat pelaksana pada umumnya bernilai cukup namun tidak didukung oleh perubahan paradigma sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan KPJM.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti adalah pemerintah provinsi dan kota DKI Jakarta. Lokasi Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berada di Jalan Merdeka Selatan 8-9 Blok F, Gambir, RT 11 RW 02 Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta; Pemerintah Kota Jakarta Pusat di jalan Tanah Abang 1 No.1 Petojo Selatan, Gambir, RT 11 RW 08, kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; Pemerintah Kota Jakarta Timur di Jalan Dr. Sumarno, RT 11 RW 08, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; Pemerintah Kota Jakarta Barat di jalan Raya Kembangan No.2 RT 02 RW 02 Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; Pemerintah Kota Jakarta Utara di jalan Laksda Yos Sudarso No.27-29 RT 19 RW 05 Kebon Bawang Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; Pemerintah Kota Jakarta Selatan di jalan Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Kepulauan Seribu di gedung Mitra Praja di jalan Sunter Permai Raya No.1 RT 11 RW 04 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

3.2 Subyek, Objek dan Unit Analisis Penelitian

3.2.1 Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara Bappeda atau Subanpeko yang terdiri dari masing-masing kurang lebih 10 orang anggota Bappeda atau subanpeko setiap wilayah pemerintah provinsi atau kota, total subyek penelitian adalah 71 orang.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah pengaruh penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penganggaran berbasis kinerja. Lokasi yang diteliti adalah pemerintah provinsi/ kota DKI Jakarta.

3.2.3 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara Bappeda atau Subanpeko di Pemerintah Provinsi atau Kota DKI Jakarta.

3.3. Populasi, Sampel dan Sampling

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara Bappeda dan Subanpeko di lingkungan Provinsi dan Pemerintah Kota DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini 71 Aparatur Sipil Negara Bappeda dan Subanpeko di Pemprov dan pemkot DKI Jakarta.

3.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi yaitu 71 Responden yang diharapkan untuk mengisi kuisisioner ini adalah aparatur sipil negara Bappeda dan Subanpeko di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota DKI Jakarta.

3.3.3. Sampling

Dalam rangka pengumpulan data, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sensus artinya seluruh responden atau Aparatur Sipil Negara Bappeda dan Subanpeko di Pemerintah Provinsi dan Kota DKI Jakarta diberikan kuisisioner.

3.4 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari penyusunan kuisisioner, uji validitas dan reliabilitas, kemudian menyebarkan kuisisioner ke responden yaitu Aparatur Sipil Negara Bappeda dan Subanpeko Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.5 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menganalisis variabel mandiri. Dengan demikian metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dari variabel mandiri.

3.5.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel mandiri yaitu penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penganggaran berbasis kinerja

Agar dapat memperjelas pengajuan hipotesis maka variable-variabel tersebut perlu didefinisikan sehingga variable tersebut dapat dioperasionalkan (Sekaran, 2010:176) menjelaskan sebagai berikut:

“Operationalizing or operationally defining a concept to render it measurable, is done by looking at the behavioral dimensions, facets, or properties denoted by the concept. These are then translated into observable and measurable elements so as to develop an index of measurement of the concept.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa operasionalisasi atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuat sesuatu terukur, dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang dilambangkan dengan konsep, kemudian diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang dapat diamati dan terukur sehingga dapat mengembangkan suatu indeks pengukuran dari sebuah konsep kelola perusahaan atau pemerintahan.

3.5.2 Operasionalisasi Variabel

Secara ringkas variabel penelitian dan operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Item
Anggaran Terpadu <i>(Unified Budget)</i>	Integrasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran	Ordinal	1
	Pemisahan Format dan struktur I-account yang baru dari belanja Negara	Ordinal	2
	Pemanfaatan Belanja Daerah	Ordinal	3
	Dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian	Ordinal	4
	Pemisahan Antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.	Ordinal	5
	Jenis format dan struktur belanja Negara	Ordinal	6
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah <i>(Medium Term Expenditure Framework /MTEF)</i>	Evaluasi Kebijakan	Ordinal	7
	Penyusunan Prioritas	Ordinal	8
	Proses Penganggaran	Ordinal	9
	Penetapan Base Line	Ordinal	10

	Penetapan Parameter	Ordinal	11
	Penerapan tiga tahun prakiraan maju	Ordinal	12

Sumber: Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2009.

3.6 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner, observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

3.6.1 Kuisioner

Peneliti melakukan survey dengan cara menyebar kuisioner atau angket sebagai instrumen penelitiannya. Cara ini sangat tipikal pada riset kualitatif dimana kuisioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik nantinya. Kuisioner dalam penelitian ini dibagikan ke Aparatur Sipil Negara Bappeda dan Subanpeko.

3.6.2 Observasi

Observasi secara sederhana bisa diartikan sebagai pengamatan. Observasi dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Observasi dilakukan dengan cara peneliti mengamati langsung ke Bappeda dan Subanpeko Pemerintah Provinsi dan Kota DKI Jakarta mengenai pelaksanaan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran Jangka Menengah dalam pencapaian penganggaran berbasis kinerja.

3.6.3 Wawancara

Metode ini biasa dilakukan baik dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Wawancara atau interview adalah proses pengumpulan data dimana informan menjawab pertanyaan yang diajukan pewawancara secara

eksklusif untuk kepentingan penelitian. Interview dilakukan secara terstruktur kepada pimpinan dan karyawan Bappeda dan Subanpeko Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota DKI Jakarta.

3.7. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan skala likert 5 4 3 2 1 untuk variabel anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya.

3.7.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kesalahan yang kecil atau dengan kata lain test tersebut menjalankan ukurannya dengan memberikan hasil yang sesuai dengan maksud test tersebut. Sehingga data yang dikumpul merupakan data yang tepat dipercaya. Dikarenakan skala pengukuran adalah data ordinal maka uji validitas menggunakan korelasi Rank Spearman.

Skala pengukuran dari data adalah data ordinal maka uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Rank Spearman dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 + \sum di^2}{2\sqrt{\sum x^2 - \sum y^2}}$$

Penelitian biasanya menggunakan tingkat alpha 5% maka dapat ditentukan validitasnya sebagai berikut:

Jika $r_{hit} > r_{table}$ maka data yang bersangkutan valid dan jika sebaliknya $r_{hitung} < r_{table}$ data yang bersangkutan tidak valid.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan yang valid. Dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas dengan tehnik belah dua Spearman Brown sebagai berikut: langkah pertama: membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua item

ganjil dimasukkan ke belahan pertama dan item genap dimasukkan ke belahan kedua (Hartikayanti, 2011).

Langkah kedua: skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden. Langkah ketiga: mengkoreksi skor total belahan pertama dengan belahan kedua dengan menggunakan teknik korelasi product momen.

Rumus Spearman-Brown dalam penelitian Hartikayanti (2011) adalah sebagai berikut:

$$r_{\text{tot}} = \frac{2r_{tt}}{1+r_{tt}}$$

keterangan:

r_{tot} = angka reliabilitas keseluruhan item

r_{tt} = koefisien belahan pertama dan belahan kedua.

Dengan tingkat keyakinan 95% maka dapat ditentukan reliabilitasnya: jika $r_{\text{tot}} > r_{\text{tabel}}$ maka data yang bersangkutan tidak reliable dan tidak layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

Berdasarkan pandangan Barker, Pistrang dan Elliot (2002) dalam penelitian Hartikayanti (2011) menyatakan bahwa untuk menyimpulkan kondisi validitas dan reliabilitas data apakah valid atau tidak maka kesimpulan hasilnya dapat dilihat berdasarkan table berikut:

Table 3.2
Standar Reliabilitas dan Validitas

	Reliabilitas Cronbach alpha	Validitas Pearson Correlation
Good	0.80	0,50
Acceptable	0.70	0.30
Marginal	0,60	0.20
Poor	0.50	0.10

Setelah uji validitas dan reliabilitas maka hasil kuisioner di rata-rata dengan cara:

$$\text{Nilai Range} = \frac{\text{total skor}}{\text{Skor tertinggi} \times \text{jumlah responden}} : \text{jumlah pernyataan} \times 100 \%$$

Kemudian dibuat range untuk 5 kategori penilaian dan menganalisis hasil isian dari responden secara deskriptif, dengan membuat kategori hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Range dan Kategori

Range (%)	Kategori
1-20	Sangat Baik
21-40	Tidak Baik
41-60	Cukup Baik
61-80	Baik
81-100	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2012:93-95)

Untuk variabel kinerja dibuat ukuran kinerja dengan menyimpulkan hasil kinerja dari ukuran kinerja yaitu dengan membuat 4 indikator kinerja berupa 4 pertanyaan dengan 3 pilihan jawaban dari setiap pertanyaan untuk responden. Responden merupakan unit analisis penelitian.

3.8 Jadwal Kegiatan dan Realisasi Biaya

3.8.1 Jadwal kegiatan

Tabel 3.4

Jadwal kegiatan penelitian yang diajukan selama 1 tahun proses

No	Keterangan kegiatan	Bulan Maret	Bulan April	Bulan Mei	Bulan Juni	Bulan Juli	Bulan Agustus	Bulan September	Bulan Oktober
1.	Persiapan Proposal								
2.	Pengajuan Proposal								
3.	Review proposal								
4.	Penyebaran kuesioner & pengumpulan								
5.	Pengolahan data kuesioner								
6.	Hasil dan analisis penelitian								
7.	Penyusunan laporan Penelitian								
8.	Finalisasi laporan								

3.8.2 Realisasi Biaya

Tabel 3.5

Realisasi Biaya

No	Komponen	Biaya yang diusulkan (6 bulan)	
		4 bulan pertama	2 bulan berikutnya
1	Honorarium untuk pelaksana, pengumpul data, pengolah data, analisis data, honor operator dan honor pembuat system	Rp.1000.000,-	
2	Pembelian Bahan Habis Pakai pada pembelian ATK, fotokopi, surat menyurat, penyusunan laporan cetak, penjilidan, publikasi, pulsa, internet, langganan jurnal, bahan pembuatan kuisisioner	Rp.1000.000,-	
3	Perjalanan untuk survey/sampling data, sosialisasi/pelatihan/evaluasi/seminar, akomodasi-konsumsi dan transport	Rp.1000.000,-	
4	Sewa untuk ruangan dan tempat pengumpulan data dan pengolahan data		Rp.500.000,-
	Total Anggaran yang diajukan	Rp. 3000.000,-	RP.500.000,-
	Total	Rp.3.500.000,-	

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Tempat Penelitian adalah di lingkungan Bappeda dan Subanpeko Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota DKI Jakarta yang telah terlibat dalam penyusunan anggaran. Pada masa globalisasi, pemerintah provinsi dan kota dimanapun perlu memperhatikan penyusunan anggaran yang bersifat anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah guna mendukung penganggaran berbasis kinerja.

Adapun pemerintah daerah DKI Jakarta meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Jakarta Timur, Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Pemerintah Kota Kepulauan Seribu. Banyaknya kuisisioner tersebar 71 eksemplar dan data kuisisioner yang kembali 71 eksemplar (100%).

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 22 pernyataan dengan rincian, 6 butir pertanyaan mengenai indikator dari variabel anggaran terpadu, 16 butir pertanyaan mengenai indikator dari variabel kerangka pengeluaran jangka menengah dan 4 butir pertanyaan tambahan mengenai anggaran berbasis kinerja (Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan, Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiatan, Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome) program dan Perbandingan antara yang biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan.

4.1.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.2.1 Uji Validitas

Tabel 4.1
Uji Validitas

Correlations

[DataSet0]

		Correlations					
		per1	per2	per3	per4	per5	per6
per1	Pearson Correlation	1	.408**	1.000**	.408**	-.108	.545**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.368	.000
	N	71	71	71	71	71	71
per2	Pearson Correlation	.408**	1	.408**	1.000**	-.246*	.518**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.039	.000
	N	71	71	71	71	71	71
per3	Pearson Correlation	1.000**	.408**	1	.408**	-.108	.545**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.368	.000
	N	71	71	71	71	71	71
per4	Pearson Correlation	.408**	1.000**	.408**	1	-.246*	.518**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.039	.000
	N	71	71	71	71	71	71
per5	Pearson Correlation	-.108	-.246*	-.108	-.246*	1	-.321**
	Sig. (2-tailed)	.368	.039	.368	.039		.006
	N	71	71	71	71	71	71
per6	Pearson Correlation	.545**	.518**	.545**	.518**	-.321**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.006	
	N	71	71	71	71	71	71

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan uji validitas maka terlihat bahwa r hitung lebih besar dari r tabel dengan N= 71 dan alpha 5% atau signifikansi 5% maka didapat r table 0,233. Dapat dikatakan semua item pernyataan 1 sampai dengan 6 adalah valid.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.2
Uji Reliabilitas

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	71	50.0
	Excluded ^a	71	50.0
	Total	142	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.807	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
per1	15.8028	9.789	.720	.741
per2	15.7465	9.763	.697	.746
per3	15.8028	9.789	.720	.741
per4	15.7465	9.763	.697	.746
per5	15.0000	15.371	-.260	.868
per6	16.1268	9.398	.606	.772

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa seluruh item pernyataan cronbach alpha yang didapat 0,807 diatas 0,60 dapat dikatakan seluruh item pernyataan reliabel.

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.2 Analisis Penerapan Anggaran Terpadu dalam mendukung Anggaran Berbasis Kinerja

Tabel 4.3
Hasil Kuisisioner
Penerapan Anggaran Terpadu

Responden	Pertanyaan						total
	1	2	3	4	5	6	
1	2	3	2	3	3	3	16
2	3	2	3	2	4	2	16
3	3	2	3	2	4	2	16
4	4	4	4	4	3	3	22
5	3	2	3	2	4	2	16
6	2	2	2	2	4	2	14
7	2	4	2	4	4	2	18
8	2	3	2	3	4	3	17
9	4	3	4	3	4	2	20
10	2	4	2	4	4	2	18
11	4	4	4	4	4	3	23
12	2	2	2	2	4	2	14
13	4	4	4	4	4	4	24
14	2	1	2	1	4	1	11
15	4	3	4	3	4	2	20
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	3	4	3	4	5	23
18	4	4	4	4	3	5	24
19	4	4	4	4	4	2	22
20	4	4	4	4	4	5	25
21	2	4	2	4	4	2	18
22	2	3	2	3	3	3	16
23	3	2	3	2	4	2	16
24	3	2	3	2	4	2	16
25	4	4	4	4	3	3	22
26	3	2	3	2	4	2	16
27	2	2	2	2	4	2	14
28	2	4	2	4	4	2	18
29	2	3	2	3	4	3	17

30	4	3	4	3	4	2	20
31	2	4	2	4	4	2	18
32	4	4	4	4	4	3	23
33	2	2	2	2	4	2	14
34	4	4	4	4	4	4	24
35	2	1	2	1	4	1	11
36	4	3	4	3	4	2	20
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	3	4	3	4	5	23
39	4	4	4	4	3	5	24
40	4	4	4	4	4	2	22
41	4	4	4	4	4	5	25
42	2	4	2	4	4	2	18
43	2	3	2	3	3	3	16
44	3	2	3	2	4	2	16
45	3	2	3	2	4	2	16
46	4	4	4	4	3	3	22
47	3	2	3	2	4	2	16
48	2	2	2	2	4	2	14
49	2	4	2	4	4	2	18
50	2	3	2	3	4	3	17
51	4	3	4	3	4	2	20
52	2	4	2	4	4	2	18
53	4	4	4	4	4	3	23
54	2	2	2	2	4	2	14
55	4	4	4	4	4	4	24
56	2	1	2	1	4	1	11
57	4	3	4	3	4	2	20
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	3	4	3	4	5	23
60	4	4	4	4	3	5	24
61	4	4	4	4	4	2	22
62	4	4	4	4	4	5	25
63	2	4	2	4	4	2	18
64	2	3	2	3	3	3	16
65	3	2	3	2	4	2	16
66	3	2	3	2	4	2	16
67	4	4	4	4	3	3	22
68	3	2	3	2	4	2	16
69	2	2	2	2	4	2	14
70	2	4	2	4	4	2	18
71	2	3	2	3	4	3	17
	216	220	216	220	273	193	1338

Berdasarkan tabel 4.3 didapat bahwa:

4.2.1.1 **Integrasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran**

Pemerintah daerah melaksanakan penganggaran dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil kuisioner maka nilai range pernyataan 1 tersebut adalah = $(216 : 355) \times 100\% = 60,845\%$ dapat dikatakan bahwa integrasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan baik.

4.2.1.2 **Pemisahan Format dan struktur I-account yang baru dari belanja negara**

Format dan struktur I-account yang baru, belanja Negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil kuisioner maka nilai range pernyataan 2 tersebut adalah = $(220:355) \times 100\% = 61,97\%$ dapat dikatakan bahwa pemisahan format dan struktur I-account yang baru dari belanja Negara dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik.

4.2.1.3 **Pemanfaatan Belanja Daerah**

Belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil kuisioner maka nilai range pernyataan 3 tersebut adalah = $(216:355) \times 100\% = 60,845\%$ dapat dikatakan pemanfaatan belanja daerah telah dilaksanakan dengan baik.

4.2.1.4 Dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian

Belanja untuk daerah berasal dari dana perimbangan dan dari dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil kuisisioner maka nilai pernyataan 4 tersebut adalah= $(220:355) \times 100\% = 61,97\%$ dapat dikatakan bahwa dana perimbangan dan dana otonomi dan penyesuaiakan telah dilaksanakan dengan baik.

4.2.1.5 Pemisahan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah

Perubahan format T-Account dan I-Account yang baru belanja Negara tetap dipisahkan Antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil kuisisioner maka nilai range pernyataan 5 tersebut adalah= $(273 \times 355) \times 100\% = 76,901\%$ yang artinya bahwa pemisahan antara belanja antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah telah dilaksanakan dengan baik.

4.2.1.6 Jenis format dan struktur belanja Negara

Dengan adanya format dan struktur belanja Negara menurut jenis belanja maka tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan

Berdasarkan tabel 4.3 hasil kuisisioner maka nilai range pernyataan 6 tersebut adalah = $(193:355) \times 100\% = 54,366\%$ yang artinya bahwa telah dilaksanakan dengan cukup baik.

4.2.1.7 Analisis Penerapan Anggaran Terpadu dalam mendukung Penganggaran Berbasis Kinerja

$$\begin{aligned} \text{Berdasarkan tabel 4.3 nilai range} &= \frac{1338}{(5 \times 71)} : 6 \times 100\% \\ &= 62,816\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan anggaran terpadu dalam mendukung penganggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan bahwa penerapan anggaran terpadu sudah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan telah terbukti secara empiris bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kota anggaran terpadu telah dilaksanakan dengan baik guna mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja. Anggaran terpadu ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan prestasi kerja kementerian/lembaga (K/N) yang dapat memuaskan masyarakat. Ada 5 komponen pokok pendekatan anggaran terpadu dalam rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga (RKA-KL), diantaranya:

A. Satuan Kerja

Penetapan Satker sebagai kuasa penguasa pengguna anggaran (KPA) untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri / pimpinan lembaga

B. Kegiatan

Setiap Satker minimal mempunyai satu kegiatan dalam rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi.

C. Keluaran

Kegiatan yang dilakukan Satker mempunyai keluaran yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan keluaran dari kegiatan lain.

D. Jenis Belanja

Jenis belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan

E. Dokumen Anggaran

Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis Satker dan kegiatan.

Secara tegas Anggaran Terpadu telah dilaksanakan tahun 2005 , dengan ditiadakannya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dari struktur dan format APBN.

4.2.2 Analisis Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Mendukung Penganggaran Berbasis Kinerja

Tabel 4.4
Hasil Kuisisioner
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

PERTANYAAN

1B	2A	2B	2C	2D	3A	3B
3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4	4
4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4

5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4	4
4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4

4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4	4
4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4

	PERTANYAAN					
RESPONDEN						
	3A	3B	3C	4	5A	5B
1	5	5	5	5	4	5
2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	4	3	3
5	4	4	3	4	3	3
6	4	4	4	4	4	4

7	5	4	4	3	4	4
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	3	4	4
10	4	4	4	4	4	4
11	4	5	4	3	4	4
12	4	4	4	4	2	4
13	4	4	4	4	4	4
14	4	4	5	4	2	3
15	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	5	4	4
18	4	5	4	4	4	3
19	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	5
21	5	5	5	4	2	4
22	5	5	5	5	4	5
23	3	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3	3
25	4	4	3	4	3	3
26	4	4	3	4	3	3
27	4	4	4	4	4	4
28	5	4	4	3	4	4
29	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	3	4	4
31	4	4	4	4	4	4
32	4	5	4	3	4	4
33	4	4	4	4	2	4
34	4	4	4	4	4	4
35	4	4	5	4	2	3
36	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4

38	4	4	4	5	4	4
39	4	5	4	4	4	3
40	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	5
42	5	5	5	4	2	4
43	5	5	5	5	4	5
44	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3
46	4	4	3	4	3	3
47	4	4	3	4	3	3
48	4	4	4	4	4	4
49	5	4	4	3	4	4
50	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	3	4	4
52	4	4	4	4	4	4
53	4	5	4	3	4	4
54	4	4	4	4	2	4
55	4	4	4	4	4	4
56	4	4	5	4	2	3
57	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	5	4	4
60	4	5	4	4	4	3
61	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	5
63	5	5	5	4	2	4
64	5	5	5	5	4	5
65	3	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3	3
67	4	4	3	4	3	3
68	4	4	3	4	3	3

69	4	4	4	4	4	4
70	5	4	4	3	4	4
71	4	4	4	4	4	4
	287	289	278	273	250	269

6A	6B	6C	1	2
3	3	5	B	A
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
4	4	4	B	B
3	4	5	A	A
3	3	4	B	A
3	4	4	B	A
3	4	4	B	B
4	4	4	B	A
4	4	4	A	B
4	4	4	B	B
2	3	4	C	C
3	4	4	B	C
3	4	4	B	B
3	4	4	A	B
3	4	4	B	B
4	4	3	A	B
3	4	5	C	A
4	4	4	A	B
3	3	5	B	A
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B

3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
4	4	4	B	B
3	4	5	A	A
3	3	4	B	A
3	4	4	B	A
3	4	4	B	B
4	4	4	B	A
4	4	4	A	B
4	4	4	B	B
2	3	4	C	C
3	4	4	B	C
3	4	4	B	B
3	4	4	A	B
3	4	4	B	B
4	4	3	A	B
3	4	5	C	A
4	4	4	A	B
3	3	5	B	A
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
4	4	4	B	B
3	4	5	A	A
3	3	4	B	A
3	4	4	B	A
3	4	4	B	B
4	4	4	B	A
4	4	4	A	B
4	4	4	B	B

2	3	4	C	C
3	4	4	B	C
3	4	4	B	B
3	4	4	A	B
3	4	4	B	B
4	4	3	A	B
3	4	5	C	A
4	4	4	A	B
3	3	5	B	A
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
3	3	3	B	B
4	4	4	B	B
3	4	5	A	A
3	3	4	B	A
3	4	4	B	A

1B	2A	2B	2C	2D	3A
3	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4
4	5	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4

4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4
4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4
4	5	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4
4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4
4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5

3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4
4	5	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4
4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4
4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4
4	5	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4

--	--	--	--	--	--	--

1 B	2 A	2 B	2 C	2 D	3 A	3 B
3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4	4
4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4

4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4	4
4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	5
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	3	4	4
4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4

5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pelaksanaan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah didapatkan bahwa:

4.2.2.1 Evaluasi Kebijakan

a. Pemerintah daerah melakukan evaluasi kebijakan yang merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi KPJM dengan penerapan paradigma Rolling budget.

Hasil yang didapat bahwa evaluasi kebijakan didapat hasil:

$(268:355) \times 100\% = 75,49\%$ dalam kategori baik yang artinya bahwa pelaksanaan evaluasi kebijakan yang didalamnya terdapat pemerintah melakukan evaluasi kebijakan yang merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi KPJM dengan penerapan rolling budget telah diterapkan dengan baik.

b. *Rolling budget* dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah pada tahun anggaran selanjutnya masih tetap dilaksanakan atau dihentikan.

Hasil yang didapatkan dari hasil kuisioner bahwa:

$(271:355) \times 100\%$ maka didapat 96,20% yang artinya bahwa evaluasi kebijakan dengan melakukan rolling budget pemerintah DKI Jakarta sudah menerapkannya dengan sangat baik.

4.2.2.2 Penyusunan prioritas

a. Pemerintah daerah melakukan penyusunan prioritas kembali berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya.

Hasil yang didapat dari penyusunan prioritas dimana pemerintah daerah melakukan penyusunan prioritas kembali berdasarkan hasil evaluasi didapatkan hasil:

$(298:355) \times 100\% = 83,49\%$ yang artinya bahwa dalam penyusunan prioritas pemerintah daerah melakukan penyusunan prioritas kembali berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya telah diterapkan dengan sangat baik.

b. Penyusunan prioritas kembali diatas perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya

Hasil yang didapat dari kusioner bahwa:

$(288:355) \times 100\% = 81,12\%$ yang artinya bahwa penyusunan prioritas kembali yang ditujukan guna memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sudah diterapkan dengan baik.

c. Pada tahapan ini pemerintah akan mengetahui seluruh kebijakan-kebijakan publik yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya, baik berupa kebijakan-kebijakan terusan/lanjutan maupun kebijakan-kebijakan baru (*new initiatives*) sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya.

Hasil kuisisioner yang didapat adalah:

$(296:355) \times 100\% = 83,38\%$ yang artinya bahwa penyusunan prioritas berguna untuk mengetahui seluruh kebijakan-kebijakan public yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya, baik berupa kebijakan-kebijakan terusan/lanjutan maupun kebijakan-kebijakan baru (*new initiatives*) sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya telah diterapkan dengan sangat baik.

d. Dengan kebijakan di atas, pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya.

Hasil yang didapat dari kuisisioner adalah:

$(287:355) \times 100\% = 80,84\%$ yang dapat dikatakan bahwa penyusunan prioritas kebijakan-kebijakan terusan/lanjutan maupun kebijakan-kebijaka baru (*new initiatives*) sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya telah diterapkan dengan sangat baik oleh pemerintah DKI Jakarta.

4.2.2.3 Proses Penganggaran

a. Pemerintah daerah, akan melakukan proses penghitungan alokasi pendanaan masing-masing kebijakan berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang ada sesuai dengan sumberdaya anggaran yang tersedia.

Hasil kuisisioner didapatkan:

$(287:355) \times 100\% = 80,84\%$ yang artinya bahwa proses penganggaran Pemerintah daerah, akan melakukan proses penghitungan alokasi pendanaan masing-masing kebijakan berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang ada sesuai dengan sumberdaya anggaran yang tersedia telah diterapkan dengan sangat baik.

b. Proses penganggaran akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan lanjutan maka identifikasi pendanaannya menggunakan asumsi pendanaan tahun sebelumnya ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap parameter-parameter yang ada.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapat:

$(289:355) \times 100\% = 81,40\%$ yang artinya bahwa Proses penganggaran akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan lanjutan maka identifikasi pendanaannya menggunakan asumsi pendanaan tahun sebelumnya ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap parameter-parameter yang ada telah diterapkan dengan sangat baik.

c. Proses penganggaran akan dilaksanakan juga mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan baru maka

identifikasi pendanaannya menggunakan metodologi penilaian kebutuhan (*need assesment*) dan penilaian ekonomi (*economic appraisal*)

Berdasarkan kuisisioner didapatkan hasil:

$(278:355) \times 100\% = 78,31\%$ yang artinya bahwa Proses penganggaran akan dilaksanakan juga mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan baru maka identifikasi pendanaannya menggunakan metodologi penilaian kebutuhan (*need assesment*) dan penilaian ekonomi (*economic appraisal*) telah diterapkan dengan baik.

4.2.2.4 **Penetapan *Baseline*.**

Yang dimaksud dengan *Baseline* dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat Tahun Anggaran ini dan tahun-tahun berikutnya dalam jangka menengah. Untuk itu pemerintah akan menetapkan *baseline* berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan usulan kegiatan baru.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan hasil:

$(273:355) \times 100\% = 76,90\%$ yang artinya bahwa penetapan *baseline* dimana seluruh biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat Tahun Anggaran ini dan tahun-tahun berikutnya dalam jangka menengah. Untuk itu pemerintah akan menetapkan *baseline* berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan usulan kegiatan baru telah diterapkan dengan baik.

4.2.2.5 **Penetapan Parameter**

a. Pemerintah daerah menetapkan parameter adalah variabel ekonomi atau spesifik (terkait) program dimana pengelola/pelaksana operasional kebijakan & pemerintah tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari keluaran.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan hasil:

$(250:355) \times 100\% = 70,422\%$ yang artinya bahwa penetapan parameter dimana variabel ekonomi atau spesifik (terkait) program dimana pengelola/pelaksana operasional kebijakan &

pemerintah tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari keluaran telah diterapkan dengan baik.

b. Dalam rangka menetapkan angka-angka untuk prakiraan maju (*forward estimate*) digunakan 2 jenis parameter, yaitu parameter ekonomi dan parameter non ekonomi.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapat hasil:

$(269:355) \times 100\% = 75,77\%$ artinya bahwa penetapan parameter dalam rangka menetapkan angka-angka untuk prakiraan maju (*forward estimate*) digunakan 2 jenis parameter, yaitu parameter ekonomi dan parameter non ekonomi telah diterapkan dengan baik.

c. Kesepakatan dibutuhkan untuk menghasilkan dan mengaplikasikan perkiraan parameter untuk prakiraan maju.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan:

$(259:355) \times 100\% = 72,96\%$ yang artinya bahwa penetapan parameter dalam hal kesepakatan dibutuhkan untuk menghasilkan dan mengaplikasikan perkiraan parameter untuk prakiraan maju telah diterapkan dengan baik.

d. Pada dasarnya penetapan parameter ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan *resources envelope* yang merupakan estimasi *top down* mengenai ketersediaan sumberdaya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas makro-fiskal.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan hasil:

$(270:355) \times 100\% = 76,06\%$ yang artinya bahwa pada dasarnya penetapan parameter ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan *resources envelope* yang merupakan estimasi *top down* mengenai ketersediaan sumberdaya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas makro-fiskal telah diterapkan dengan baik.

4.2.2.6 Penerapan tiga tahun prakiraan maju.

a. Pemerintah daerah menerapkan periode 3 (tiga) setelah tahun anggaran yang tengah disusun ($t+3$) diperkirakan cukup realistis.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan:

$(229:355) \times 100\% = 64,51\%$ dapat diartikan bahwa Pemerintah daerah menerapkan periode 3 (tiga) setelah tahun anggaran yang tengah disusun (t+3) diperkirakan cukup realistis telah diterapkan dengan baik.

b. Konsep "rolling budget" akan dilakukan berbagai penyesuaian secara periodic untuk menghasilkan angka indikasi resource envelope yang relative akurat.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan:

$(257:355) \times 100\% = 72,39\%$ yang artinya bahwa konsep "rolling budget" akan dilakukan berbagai penyesuaian secara periodic untuk menghasilkan angka indikasi resource envelope yang relative akurat telah diterapkan dengan baik.

c. Tingkat akurasi yang baik dalam proyeksi ketersediaan sumber daya akan memudahkan para perencana kebijakan untuk mendisain kebijakan yang relative lebih komprehensif, karena dimensi waktu pencapaian sasaran secara konsisten akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan tidak hanya berorientasi hanya kepada satu tahun anggaran semata.

Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan:

$(276:355) \times 100\% = 77,75\%$ yang artinya bahwa Tingkat akurasi yang baik dalam proyeksi ketersediaan sumber daya akan memudahkan para perencana kebijakan untuk mendisain kebijakan yang relative lebih komprehensif, karena dimensi waktu pencapaian sasaran secara konsisten akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan tidak hanya berorientasi hanya kepada satu tahun anggaran semata telah diterapkan dengan baik.

4.2.2.7 Analisis penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penganggaran berbasis kinerja.

Tabel 4.5
Hasil Kuisisioner
Penerapan Anggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah

RESPONDEN	Anggaran terpadu						KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH													TOTAL					
	PERTANYAAN						PERTANYAAN																		
	1	2	3	4	5	6 total	1A	1B	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	4 SA	5B	5C	5D	6A	6B	6C			
1	2	3	2	3	3	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	106	
2	3	2	3	2	4	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83	
3	3	2	3	2	4	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83	
4	4	4	4	4	3	22	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	104	
5	3	2	3	2	4	16	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	90	
6	2	2	2	2	4	14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97	
7	2	4	2	4	4	18	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	106	
8	2	3	2	3	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	100	
9	4	3	4	3	4	20	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	107	
10	2	4	2	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	109	
11	4	4	4	4	4	23	3	4	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	116	
12	2	2	2	2	4	14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	95	
13	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116	
14	2	1	2	1	4	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	3	4	4	2	3	85	
15	4	3	4	3	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	107	
16	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	115	
17	4	3	4	3	4	23	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	3	5	3	4	114	
18	4	4	4	4	3	24	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	3	4	3	4	4	118	
19	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	111	
20	4	4	4	4	4	25	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	119	
21	2	4	2	4	4	18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	4	2	4	4	4	109	
22	2	3	2	3	3	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	106	
23	3	2	3	2	4	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83	
24	3	2	3	2	4	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83	
25	4	4	4	4	3	22	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	104	
26	3	2	3	2	4	16	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	90	
27	2	2	2	2	4	14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97	
28	2	4	2	4	4	18	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	106	
29	2	3	2	3	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	100	
30	4	3	4	3	4	20	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	107	
31	2	4	2	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	103	
32	4	4	4	4	4	23	3	4	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	116	
33	2	2	2	2	4	14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	95	
34	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116	
35	2	1	2	1	4	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	3	4	4	2	3	85	
36	4	3	4	3	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	107	
37	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	115	
38	4	3	4	3	4	23	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	3	5	3	4	4	114	
39	4	4	4	4	3	24	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	118	
40	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	111	
41	4	4	4	4	4	25	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	119	
42	2	4	2	4	4	18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	4	2	4	4	109	
43	2	3	2	3	3	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	106	
44	3	2	3	2	4	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83	
45	3	2	3	2	4	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83	
46	4	4	4	4	3	22	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	104	
47	3	2	3	2	4	16	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	90	
48	2	2	2	2	4	14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97	
49	2	4	2	4	4	18	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	106	
50	2	3	2	3	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	100	
51	4	3	4	3	4	20	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	107	
52	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	103	
53	4	4	4	4	4	23	3	4	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	116	
54	2	2	2	2	4	14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	95	
55	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	116	
56	2	1	2	1	4	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	3	4	4	2	3	85	
57	4	3	4	3	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	107	
58	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	115	
59	4	3	4	3	4	23	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	3	5	3	4	114	
60	4	4	4	4	4	24	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	3	4	3	4	4	118	
61	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	111	
62	4	4	4	4	4	25	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	119	
63	2	4	2	4	4	18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	4	2	4	4	109	
64	2	3	2	3	3	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	106	
65	3	2	3	2	4	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83	
66	3	2	3	2	4	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83	
67	4	4	4	4	3	22	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	104	
68	3	2	3	2	4	16	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	90	
69	2	2	2	2	4	14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97	
70	2	4	2	4	4	18	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	106	
71	2	3	2	3	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	100	
216	220	216	220	273	193	1338	268	271	298	288	296	287	287	289	278	273	250	269	259	270	229	257	276	7321	
						3,84507	2,71831	3,769014																	4,48316

Berdasarkan tabel 4.5 hasil kuisioner bahwa penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja adalah:

$(7321:355)/22=93,74\%$ yang artinya bahwa penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja telah diterapkan dengan sangat baik.

4.2.2.7 Penganggaran Berbasis Kinerja

Tabel 4.6
Penganggaran Berbasis Kinerja

	1	2	3	4
B	A	B	A	
B	B	B	B	
B	B	B	B	
B	B	B	B	
B	B	B	B	
B	B	B	B	
A	A	C	B	
B	A	A	B	
B	A	C	B	
B	B	B	B	
B	A	A	A	
A	B	A	A	
B	B	B	B	
C	C	B	B	
B	C	C	B	
B	B	B	B	
A	B	B	A	
B	B	B	B	
A	B	A	C	
C	A	C	B	
A	B	A	B	
B	A	B	A	
B	B	B	B	
B	B	B	B	
B	B	B	B	
B	B	B	B	
B	B	B	B	
A	A	C	B	
B	A	A	B	
B	A	C	B	
B	B	B	B	
B	A	A	A	
A	B	A	A	
B	B	B	B	
C	C	B	B	
B	C	C	B	
B	B	B	B	
A	B	B	A	
B	B	B	B	
A	B	A	C	
C	A	C	B	
A	B	A	B	

B	A	B	A
B	B	B	B
B	B	B	B
B	B	B	B
B	B	B	B
B	B	B	B
A	A	C	B
B	A	A	B
B	A	C	B
B	B	B	B
B	A	A	A
A	B	A	A
B	B	B	B
C	C	B	B
B	C	C	B
B	B	B	B
A	B	B	A
B	B	B	B
A	B	A	C
C	A	C	B
A	B	A	B
B	A	B	A
B	B	B	B
B	B	B	B
B	B	B	B
B	B	B	B
B	B	B	B
A	A	C	B
B	A	A	B

Berdasarkan tabel 4.6 didapat hasil bahwa:

- a. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan:
Berdasarkan hasil kuisioner bahwa perbandingan antara rencana dan realisasi masukan kurang dari 100 persen. Artinya pencapaian yang terjadi tidak sesuai dengan perencanaan masukan.
- b. Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiatan
Berdasarkan hasil kuisioner bahwa perbandingan rencana dan realisasi keluaran tidak mencapai 100% yang artinya bahwa yang direncanakan tidak semuanya terealisasi.
- c. Persentase (%) pencapaian target hasil (*outcome*)

Berdasarkan hasil kuisioner bahwa persentase pencapaian target hasil (*outcome*) kurang dari 100 persen yang artinya bahwa tidak sesuai dengan perencanaan.

d. Perbandingan antara biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan

Berdasarkan hasil kuisioner bahwa perbandingan antara biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan adalah kurang dari 100 persen yang artinya bahwa standar dan biaya yang terjadi tidak sama.

Berdasarkan pengamatan dan analisis kuisioner memang di pemerintah DKI Jakarta banyak sekali terjadi antara rencana kegiatan dan realisasi tidak sampai 100 persen jadi dapat dikatakan belum tercapai semua, namun dapat dikatakan baik karena pencapaian 75 persen saja masih dikatakan baik.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari hasil kuisioner dan pengamatan maka kesimpulan dari penelitian adalah:

5.1.1 **Penerapan anggaran terpadu** telah dilaksanakan dengan baik dengan hasil sebagai berikut:

- a. Integrasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah daerah melaksanakan penganggaran dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkandokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program ,kegiatan dan jenis belanja telah diterapkan dengan baik
- b. Format dan struktur Pemisahan Format dan struktur I-account yang baru dari belanja Negara
Format dan struktur I-account yang baru, belanja Negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat belanja untuk daerah telah diterapkan dengan dengan baik
- c. Pemanfaatan belanja daerah telah diterapkan
Belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah telah diterapkan dengan baik.
- d. Dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian

Belanja untuk daerah berasal dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian telah diterapkan dengan baik.

- e. Pemisahan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah

Perubahan format T-Account dan I-Account yang baru belanja Negara tetap dipisahkan Antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah telah diterapkan dengan baik.

- f. Jenis format dan struktur belanja Negara telah diterapkan dengan baik.

Dengan adanya format dan struktur belanja Negara menurut jenis belanja maka tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan telah diterapkan dengan baik.

5.1.2 Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja telah diterapkan dengan baik.

Dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi Kebijakan.

Pemerintah daerah melakukan evaluasi kebijakan yang merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi KPJM dengan penerapan paradigma Rolling budget telah diterapkan dengan baik dengan tahapan analisis sebagai berikut:

Rolling budget dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah pada tahun anggaran selanjutnya masih tetap dilaksanakan atau dihentikan telah diterapkan dengan sangat baik

b.Penyusunan Prioritas

Pemerintah daerah melakukan penyusunan prioritas kembali berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya telah diterapkan dengan sangat baik

Penyusunan prioritas kembali diatas perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya

Pada tahapan ini pemerintah akan mengetahui seluruh kebijakan- Kebijakan publik yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya, baik berupa kebijakan-kebijakan terusan/lanjutan maupun kebijakan-kebijakan baru (*new initiatives*) sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya telah diterapkan dengan sangat baik.

Dengan kebijakan di atas, pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya telah diterapkan dengan sangat baik.

c.Proses Penganggaran

Pemerintah daerah, akan melakukan proses penghitungan alokasi pendanaan masing-masing kebijakan berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang ada sesuai dengan sumberdaya anggaran yang tersedia telah diterapkan dengan baik, dengan tahapan analisis sebagai berikut:

Proses pendanaannya menggunakan asumsi pendanaan tahun sebelumnya ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap parameter-parameter yang ada telah diterapkan dengan sangat baik.

Proses penganggaran akan dilaksanakan juga mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan baru maka identifikasi pendanaannya menggunakan metodologi penilaian kebutuhan (*need assesment*) dan penilaian ekonomi (*economic appraisal*) telah diterapkan dengan sangat baik.

d. Penetapan Baseline

Yang dimaksud dengan Baseline dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat Tahun Anggaran ini dan tahun-tahun berikutnya dalam jangka menengah. Untuk itu pemerintah akan menetapkan baseline berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan usulan kegiatan baru telah diterapkan dengan sangat baik.

e. Penetapan Parameter

Pemerintah daerah menetapkan parameter adalah variabel ekonomi atau spesifik (terkait) program dimana pengelola/pelaksana operasional kebijakan & pemerintah tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari keluaran telah diterapkan dengan baik dengan tahapan analisis sebagai berikut:

Dalam rangka menetapkan angka-angka untuk prakiraan maju (*forward estimate*) digunakan 2 jenis parameter, yaitu parameter ekonomi dan parameter non ekonomi telah diterapkan dengan baik.

Kesepakatan dibutuhkan untuk menghasilkan dan mengaplikasikan perkiraan parameter untuk prakiraan maju telah diterapkan dengan baik.

Pada dasarnya penetapan parameter ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan *resources envelope* yang merupakan estimasi top down mengenai ketersediaan sumberdaya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas makro-fiskal telah diterapkan dengan baik.

f. Penetapan Tiga Tahun Prakiraan Maju

Pemerintah daerah menerapkan periode 3 (tiga) setelah tahun anggaran yang tengah disusun (t+3) diperkirakan cukup realistis telah diterapkan dengan baik dengan tahapan analisis sebagai berikut:

Konsep "rolling budget" akan dilakukan berbagai penyesuaian secara periodic untuk menghasilkan angka

indikasi resource envelope yang relative akurat telah diterapkan dengan baik.

Tingkat akurasi yang baik dalam proyeksi ketersediaan sumber daya akan memudahkan para perencana kebijakan untuk mendisain kebijakan yang relative lebih komprehensif, karena dimensi waktu pencapaian sasaran secara konsisten akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan tidak hanya berorientasi hanya kepada satu tahun anggaran semata telah diterapkan dengan baik.

5.1.3 Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang didukung oleh penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah telah diterapkan dengan baik.

Dengan rincian sebagai berikut:

a. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan:

Berdasarkan hasil kuisisioner bahwa perbandingan antara rencana dan realisasi masukan kurang dari 100 persen. Artinya pencapaian yang terjadi tidak sesuai dengan perencanaan masukan.

b. Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiatan

Berdasarkan hasil kuisisioner bahwa perbandingan rencana dan realisasi keluaran tidak mencapai 100% yang artinya bahwa yang direncanakan tidak semuanya terealisasi.

c. Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome)

Berdasarkan hasil kuisisioner bahwa persentase pencapaian target hasil (outcome) kurang dari 100 persen yang artinya bahwa tidak sesuai dengan perencanaan.

d. Perbandingan antara biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan

Berdasarkan hasil kuisisioner bahwa perbandingan antara biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan adalah kurang dari 100 persen yang artinya bahwa standar dan biaya yang terjadi tidak sama.

Berdasarkan pengamatan dan analisis kuisisioner memang di pemerintah DKI Jakarta banyak sekali terjadi antara rencana kegiatan dan realisasi tidak sampai 100 persen jadi dapat dikatakan belum tercapai semua, namun dapat dikatakan baik karena pencapaian 75 persen saja masih dikatakan baik.

Berdasarkan analisis pula bahwa Berdasarkan tabel 4.5 hasil kuisisioner bahwa penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja adalah: $(7321:355)/22=93,74\%$ yang artinya bahwa penerapan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja telah diterapkan dengan sangat baik. Artinya bahwa dengan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah sangat mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terlihat pada pengukuran penganggaran berbasis kinerja.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah:

5.2.1 Sebaiknya pemerintah DKI Jakarta lebih meningkatkan lagi kepada perbaikan-perbaikan dibawah ini:

a. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan:

Berdasarkan hasil kuisisioner bahwa perbandingan antara rencana dan realisasi masukan kurang dari 100 persen. Artinya pencapaian yang terjadi tidak sesuai dengan perencanaan masukan, diharapkan pencapaian 100 persen

b. Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiatan

Berdasarkan hasil kuisisioner bahwa perbandingan rencana dan realisasi keluaran tidak mencapai 100% yang artinya bahwa yang direncanakan tidak semuanya terealisasi. Sangat diharapkan peningkatan rencana dan realisasi keluaran mencapai 100%

c. Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome)

Berdasarkan hasil kuisisioner bahwa persentase pencapaian target hasil (outcome) kurang dari 100 persen yang artinya bahwa tidak sesuai dengan perencanaan.

Sangat diharapkan pencapaian 100% dalam pencapaian hasil (*outcome*).

d. Perbandingan antara biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan

Berdasarkan hasil kuisisioner bahwa perbandingan antara biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan adalah kurang dari 100 persen yang artinya bahwa standar dan biaya yang terjadi tidak sama.

Sangat diharapkan biaya yang berlaku sama dengan biaya standar yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Demikian laporan penelitian ini disusun dengan harapan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 6 Nopember 2019

Ketua Tim Peneliti



Nelli Novyarni, SE., M.Si., Ak., CSRS., CSRA., CSP.

NIDN:0306117501

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy 2010. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau medium term expenditure framework (MTEF).”available at: website syukriy.wordpress.com
- Simamoyu, Anggito. 2010. Format anggaran terpadu menghilangkan tumpang tindih. Available at:www.google.com
- Agus, Puji dan Riyanto. 2012. Pengaruh Implementasi Penganggaran Terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah terhadap kinerja. Penerbit: Badan pendidikan dan pelatihan keuangan.
- Allen, Richard and Daniel Tommasi.2001. *Managing Public Expenditure. A Reference Book For Transition Countries,Paris:OECD*
- Amny Ratnawati. 2009. Reformasi Anggaran dilatarbelakangi dua hal. Available at: <https://economy.okezone.com/read/2009/09/10/20/256428/reformasi-anggaran-dilatarbelakangi-dua-hal>
- Alai Diklat Keuangan Cimahi. 2012 .*Bagaimana penganggaran berbasis Kinerja dan Kerangka PengeluaranJangka Menengah mempengaruhi bisnis operasional pada satuan kerja?* Available at: www.google.com
- Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. Buku 1: Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Penerbit:

Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

2009. Buku 2: Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.
Penerbit: Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

2009. Buku 3: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah. Penerbit: Departemen Keuangan Republik Indonesia dan
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

2009. Buku 4: Format Baru Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-KL). Penerbit: Departemen Keuangan Republik Indonesia
dan Kementerian Negara

2009. Buku 5: Jadwal Pelaksanaan dan Penutup. Penerbit: Departemen
Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

LeHouerou, Phillippe and Robert Taliercio.2002. Medium Term Expenditure
Frameworks: From Concept to Practice. Preliminary Lessons From Africa.
The World Bank, African Region *Working Paper Series No.28*

Nantarar Charonkul dan Pruet Saribanpitak. 2010. Sebuah Model Integrasi dari Performance-Bsased Budgeting yang dilakukan di Perguruan Tinggi di Thailand. "available at: www.google.com

Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004

Peraturan pemerintah No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Peraturan menteri dalam negeri no.13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sri Mulyani. 2009. Enam Kemenrtrian Jajal Anggaran Berbasis Kinerja. Available at: <https://bisnis.tempo.co/read/187019/enam-kementerian-jajal-anggaran-berbasis-kinerja/full&view=ok>

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan nemb nasional

Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004

Peraturan menteri keuangan tentang petunjuk penyusunan RKA-KL (rencana kerja kementerian dan anggaran- kementerian lembaga)yang ditetapkan dan diterbitkan tiap tahun.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah pasal 1 angka 34 PP No.58/2005 dan pasal 1 angka 36 Permendagri No,13/2006.

_____ Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM pada Direktorat Jendral Perlindungan HAM. Available at: www.digilib.ui.ac.id website www.digilib.ui.ac.id

Zuliansyah, Viki. 2012. Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di kantor satuan polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar.” Jurnal ekonomi.pp.10

World Bank. 1998. Public Expenditure Management Handbook. Washington D.C. The World Bank

3 artinya ragu-ragu

Berilah tanda check list (√) pada bagian yang sudah dipilih dari pernyataan berikut ini:

1. Anggaran Terpadu (Unified Budget)

No	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1	Integrasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah daerah melaksanakan penganggaran dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.					
2	Pemisahan Format dan struktur I-account yang baru dari belanja Negara Format dan struktur I-account yang baru, belanja Negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.					
3	Pemanfaatan Belanja Daerah Belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.					
4	Dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Belanja untuk daerah berasal dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian					
5	Pemisahan Antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah Perubahan format T-Account dan I-Account yang baru belanja Negara tetap dipisahkan Antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.					
6	Jenis format dan struktur belanja Negara Dengan adanya format dan struktur belanja Negara menurut jenis belanja maka tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan					

2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework /MTEF)

No	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1	Evaluasi Kebijakan.					
	a. Pemerintah daerah melakukan evaluasi kebijakan yang merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi KPJM dengan penerapan paradigma Rolling budget.					
	b. Rolling budget dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah pada tahun anggaran selanjutnya masih tetap dilaksanakan atau dihentikan.					
2	Penyusunan prioritas.					
	a. Pemerintah daerah melakukan penyusunan prioritas kembali berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya.					
	b. Penyusunan prioritas kembali diatas perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya					
	c. Pada tahapan ini pemerintah akan mengetahui seluruh kebijakan- Kebijakan publik yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya, baik berupa kebijakan-kebijakan terusan/lanjutan maupun kebijakan-kebijakan baru (<i>new initiatives</i>) sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya.					
	d. Dengan kebijakan di atas, pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya.					
3	Proses Penganggaran.					
	a. Pemerintah daerah, akan melakukan proses penghitungan alokasi pendanaan masing-masing kebijakan berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang ada sesuai dengan sumberdaya anggaran					

	yang tersedia.					
	b. Proses penganggaran akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan lanjutan maka identifikasi pendanaannya menggunakan asumsi pendanaan tahun sebelumnya ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap parameter-parameter yang ada.					
	c. Proses penganggaran akan dilaksanakan juga mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan baru maka identifikasi pendanaannya menggunakan metodologi penilaian kebutuhan (<i>need assesment</i>) dan penilaian ekonomi (<i>economic appraisal</i>)					
4	Penetapan Baseline. Yang dimaksud dengan Baseline dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat Tahun Anggaran ini dan tahun-tahun berikutnya dalam jangka menengah. Untuk itu pemerintah akan menetapkan baseline berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan usulan kegiatan baru.					
5	Penetapan Parameter a. Pemerintah daerah menetapkan parameter adalah variabel ekonomi atau spesifik (terkait) program dimana pengelola/pelaksana operasional kebijakan & pemerintah tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari keluaran.					
	b. Dalam rangka menetapkan angka-angka untuk prakiraan maju (<i>forward estimate</i>) digunakan 2 jenis parameter, yaitu parameter ekonomi dan parameter non ekonomi.					
	c. Kesepakatan dibutuhkan untuk menghasilkan dan mengaplikasikan perkiraan parameter untuk prakiraan maju.					
	d. Pada dasarnya penetapan parameter ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan <i>resources envelope</i> yang					

	merupakan estimasi top down mengenai ketersediaan sumberdaya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas makro-fiskal.					
6	Penerapan tiga tahun prakiraan maju. a. Pemerintah daerah menerapkan periode 3 (tiga) setelah tahun anggaran yang tengah disusun (t+3) diperkirakan cukup realistis.					
	b. Konsep "rolling budget" akan dilakukan berbagai penyesuaian secara periodic untuk menghasilkan angka indikasi resource envelope yang relative akurat.					
	c. Tingkat akurasi yang baik dalam proyeksi ketersediaan sumber daya akan memudahkan para perencana kebijakan untuk mendisain kebijakan yang relative lebih komprehensif, karena dimensi waktu pencapaian sasaran secara konsisten akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan tidak hanya berorientasi hanya kepada satu tahun anggaran semata.					

3. Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan:
 - a. 1:1 b.<100% c. >100%
2. Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiatan
 - a. 1:1 b.<100% c.>100%
3. Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome) program
 - a. 100% b.<100% c.>100%
4. Perbandingan antara yang biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan
 - a. 1:1 b.<100% c.>100%

Lampiran 2

Jakarta, 6 Nopember 2019

Kepada Yth.

Kepala Bagian Keuangan

Ibu Fanisyah Maliki, SE., M.Ak

Di

Tempat.

Dengan hormat.

Assalamualaikum wr.wb

Berikut ini kami sampaikan Laporan realisasi biaya dan bukti realisasi biaya Penelitian 2019 atas nama: Nelli Novyarni dan Imelda Aprileny, dengan judul: Evaluasi penerapan Pendekatan Anggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam Mendukung Penganggaran Berbasis Kinerja sebesar Rp.3500.000 yang diberikan STEI, Jakarta kepada kami.

Demikianlah Laporan ini Kami buat, atas bantuan dan kerjasama Ibu, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb.

Ketua Tim Peneliti

Nelli Novyarni, SE., M.Si., Ak., CSRS., CSRA., CSP

Laporan Realisasi Biaya Penelitian
Nelli Novyarni dan Imelda Aprileny

No	Komponen	Biaya yang diusulkan (6 bulan)	
		4 bulan pertama	2 bulan berikutnya
1	Honorarium untuk pelaksana, pengumpul data, pengolah data, analisis data, honor operator dan honor pembuat system	Rp.1000.000,-	
2	Pembelian Bahan Habis Pakai pada pembelian ATK, fotokopi, surat menyurat, penyusunan laporan cetak, penjilidan, publikasi, pulsa, internet, langganan jurnal, bahan pembuatan kuisisioner	Rp.1000.000,-	
3	Perjalanan untuk survey/sampling data, sosialisasi/pelatihan/evaluasi/seminar, akomodasi-konsumsi dan transport	Rp.1000.000,-	
4	Sewa untuk ruangan dan tempat pengumpulan data dan pengolahan data		Rp.500.000,-
	Total Anggaran yang diajukan	Rp. 3000.000,-	RP.500.000,-
	Total	Rp.3.500.000,-	

No. 01
Telah terima dari Setotah Tinggi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Uang sejumlah LIMA RATUS PULUH RUPIAH
Untuk pembayaran Honorarium pelaksanaan pengumpulan data pengalihan hak ulat laut pada
Rp 500.000,-
19 April 2016
Hikmah Nugroho



No. 02
Telah terima dari Setotah Tinggi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Uang sejumlah LIMA RATUS RIBU RUPIAH
Untuk pembayaran Honorarium operator dan pembuat niten
Rp 500.000,-
19 April 2016
Imelda Kambay





No. 05
 Melalui surat ini
 Uang sepadan
 Untuk pembelian
 LIMA RATUS RIBU RUPIAH
 pelajaran, beasiswa, almamater
 Rp. 500.000,-
 18 Oktober 2019
 Meli Nugraeni



No. 06
 Melalui surat ini
 Uang sepadan
 Untuk pembelian
 LIMA RATUS RIBU RUPIAH
 biaya tempat makan penghap-
 dan / pengalihan data
 Rp. 500.000,-
 25 Oktober 2019
 Meli Nugraeni